

**KEMENTERIAN KELAUTAN DAN PERIKANAN
BADAN RISET DAN SDM KELAUTAN DAN PERIKANAN
PUSAT PELATIHAN DAN PENYULUHAN PERIKANAN KP
BALAI PELATIHAN DAN PENYULUHAN PERIKANAN AMBON**



**LAPORAN KINERJA
TRIWULAN I
TAHUN 2021**



KATA PENGANTAR

Penyusunan Laporan Kinerja Triwulan I Tahun 2021 Balai Pelatihan dan Penyuluhan Perikanan (BPPP) Ambon ini disusun sebagai wujud pertanggungjawaban kinerja tahun 2020 berdasarkan Peraturan Presiden Nomor 29 Tahun 2010 tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (SAKIP), dan Peraturan Menteri PAN dan Reformasi Birokrasi Nomor 53 Tahun 2014 tentang Petunjuk Teknis Perjanjian Kinerja, Pelaporan Kinerja dan Tata Cara Reviu atas Laporan Kinerja Instansi Pemerintah, dimana Balai Pelatihan dan Penyuluhan Perikanan Ambon sebagai salah satu Instansi Pemerintah berkewajiban menyusun laporan kinerja instansi pemerintah sebagai media informasi, pertanggungjawaban kinerja serta sebagai alat pengendali menuju terwujudnya akuntabilitas penyelenggaraan program pelatihan dan penyuluhan di bidang kelautan dan perikanan.

Laporan kinerja Triwulan I Tahun 2021 ini memberikan gambaran tentang keberhasilan maupun kegagalan kinerja yang telah ditetapkan dalam Perjanjian Kinerja Balai Pelatihan dan Penyuluhan Perikanan Ambon pada Triwulan I Tahun 2021. Perjanjian kinerja tersebut merupakan penjabaran lebih lanjut dari Renstra Balai Pelatihan dan Penyuluhan Perikanan Ambon tahun 2020-2024 dan perwujudan tata kelola pemerintah yang baik (*Good Governance*) dimana akuntabilitas adalah sebagai salah satu wujud komitmen Balai Pelatihan dan Penyuluhan Perikanan Ambon dalam mempertanggungjawabkan pengelolaan anggaran dan pengendalian sumberdaya dalam penyelenggaraan pelatihan dan penyuluhan pada akhir periode pengukuran.

Selama Triwulan I Tahun 2021, Balai Pelatihan dan Penyuluhan Perikanan Ambon telah melaksanakan berbagai kegiatan sebagaimana tertuang dalam dokumen Perjanjian Kinerja tahun 2020 yang terdiri dari 6

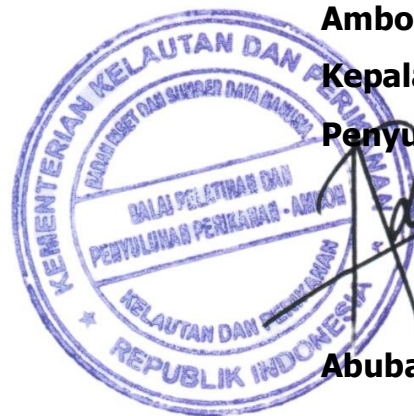


sasaran strategis dan 20 Indikator Kinerja Utama (IKU). Dalam laporan kinerja ini dijabarkan mengenai target dan realisasi kinerja pada Triwulan I Tahun 2021, keberhasilan/kegagalan program, permasalahan dan solusi serta kinerja lainnya yang telah dicapai oleh Balai Pelatihan dan Penyuluhan Perikanan Ambon.

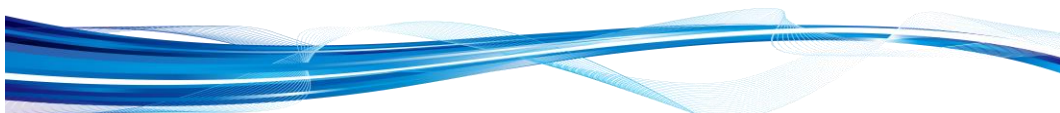
Akhir kata, semoga penyajian Laporan Kinerja Balai Pelatihan dan Penyuluhan Perikanan Ambon ini dapat menjadi media pertanggungjawaban kinerja kami kepada masyarakat atas mandat yang diemban oleh Balai Pelatihan dan Penyuluhan Perikanan Ambon dan sebagai bahan evaluasi kinerja organisasi selama tahun 2021 dan umpan balik untuk terus meningkatkan kinerja kedepan secara produktif, efektif dan efisien baik dari aspek perencanaan, pengorganisasian, manajemen keuangan dan koordinasi pelaksanaannya.

Ambon, 14 April 2021

**Kepala Balai Pelatihan dan
Penyuluhan Perikanan Ambon**



Abubakar



TIM PENYUSUN

Penanggung Jawab:

Abubakar S.St.Pi, M.Si

Ketua:

Rahmawati Umasugi S.Pi, M.Si

Sekretaris :

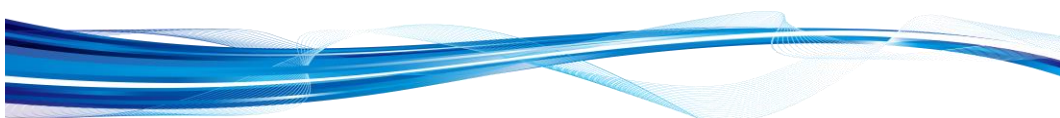
Moh. Arief Hidayat A.Md

Anggota:

Fiona A.B. Nikyuluw S.Pi, M.Si

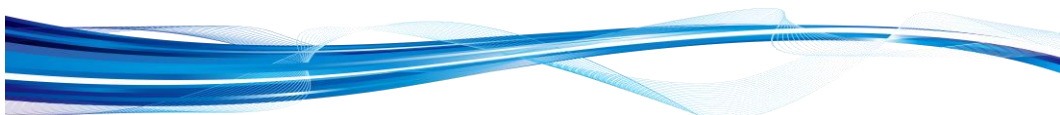
Wahyu Retno Aris S.St.Pi

Dessy Rompis



DAFTAR ISI

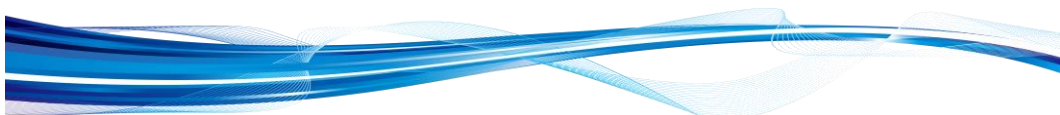
KATA PENGANTAR	i
TIM PENYUSUN	iii
DAFTAR ISI	iv
IKTISAR EKSEKUTIF	v
BAB I PENDAHULUAN	1
1.1 Latar Belakang	1
1.2 Tujuan	6
1.3 Tugas dan Fungsi BPPP Ambon	6
1.4 Keragaan SDM BPPP Ambon.....	9
1.5 Sistematika Penyajian Laporan Kinerja Instansi Pemerintah.....	10
BAB II PERENCANAAN KINERJA	13
2.1 Rencana Strategis	13
2.2 Rencana Kerja Tahun 2020	23
2.3 Penetapan Kinerja Tahun 2020	24
2.4 Pengukuran Kinerja.....	27
BAB III AKUNTABILITAS KINERJA	30
3.1 Prestasi Kinerja.....	30
3.2 Evaluasi dan Analisis Kinerja.....	31
3.3 Akuntabilitas Keuangan	52
BAB IV PENUTUP	54
4.1 Capaian Kinerja Utama	54
4.2 Permasalahan dan Rekomendasi	56
LAMPIRAN	



IKTISAR EKSEKUTIF

Sasaran kinerja yang dicapai pada tahun 2020 Balai Pelatihan dan Penyuluhan Perikanan Ambon yaitu administrasi kepegawaian, pengelolaan administrasi kepegawaian, pengelolaan administrasi keuangan, ketatausahaan, perlengkapan dan kerumahtanggaan, pengelolaan kerjasama, informasi dan dokumentasi ilmiah yang terintegrasi, akuntabel dan tepat waktu berdasarkan data yang terkini dan akurat di lingkup Balai Pelatihan dan Penyuluhan Perikanan Ambon.

Balai Pelatihan dan Penyuluhan Perikanan Ambon telah menetapkan 6 (Enam) Sasaran Strategis yang akan dicapai pada Tahun 2021. Dari 6 (Enam) Sasaran Strategis tersebut selanjutnya diukur dengan mengaplikasikan 20 (Duapuluh) indikator kinerja, yang selanjutnya ditetapkan dalam dokumen Perjanjian Kinerja Tahun 2021 dan merupakan target kinerja Balai yang harus diselesaikan sampai dengan akhir tahun 2021.

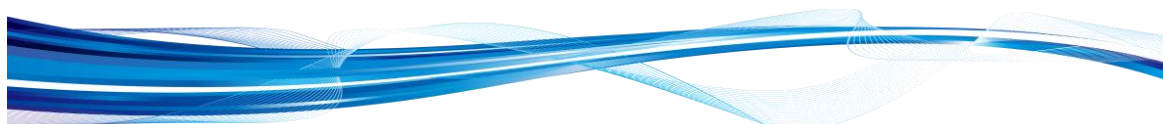


BAB I PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang

Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional (RPJMN) 2020-2024 merupakan tahapan keempat sekaligus periode terakhir dalam dokumen Rencana Pembangunan Jangka Panjang Nasional (RPJPN) 2005-2025 yang telah ditetapkan melalui Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2007, tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Nasional (RPJPN) Tahun 2005-2025. RPJPN menjadi sarana memantapkan pembangunan secara menyeluruh di berbagai bidang dengan menekankan pencapaian daya saing kompetitif perekonomian berlandaskan keunggulan sumber daya alam dan sumber daya manusia (SDM) berkualitas, serta kemampuan ilmu pengetahuan dan teknologi (IPTEK) yang terus meningkat.

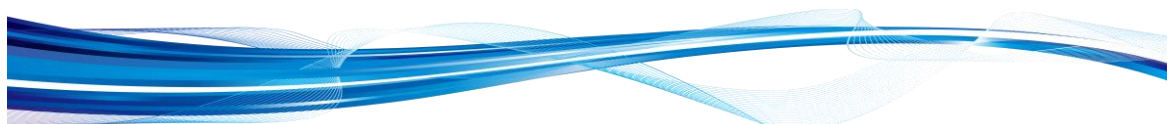
Tujuan pembangunan kelautan dan perikanan (KP) jangka panjang pada periode pembangunan tahap ke 4 (2020-2024) adalah mewujudkan masyarakat Indonesia yang mandiri, maju, adil, dan makmur melalui percepatan pembangunan di berbagai bidang dengan menekankan terbangunnya struktur perekonomian yang kokoh berlandaskan keunggulan kompetitif di berbagai wilayah yang didukung oleh SDM berkualitas dan berdaya saing. Hal ini ditegaskan dalam misi ketujuh pembangunan nasional yaitu mewujudkan Indonesia menjadi negara kepulauan yang mandiri, maju dengan basis kepentingan Nasional. Visi tersebut selaras dengan salah satu sasaran pokok RPJPN 2005-2025, yaitu "Terwujudnya Indonesia sebagai negara kepulauan yang mandiri, maju, kuat, dan berbasiskan kepentingan nasional". RPJMN



2020-2024 akan mempengaruhi pencapaian target pembangunan dalam RPJPN, dimana pendapatan perkapita Indonesia akan mencapai tingkat kesejahteraan setara dengan negara-negara berpenghasilan menengah atas (*upper-middle income country/ MIC*) yang memiliki kondisi infrastruktur, kualitas sumber daya manusia, layanan publik, serta kesejahteraan rakyat yang lebih baik.

Perkembangan IPTEK yang pesat di era revolusi industri 4.0 dan era sosial (*society*) 5.0 menuntut adanya perubahan tatanan kehidupan baru yang berpusat pada manusia (*human-centered*) serta berbasis teknologi (*technology based*). *Cyber-physical system* (CPS) dalam Industri 4.0 merupakan integrasi antara *physical system*, komputasi dan juga *network/komunikasi*, sedangkan *society 5.0* merupakan penyempurnaan dari CPS menjadi *cyber-physical-human systems*. Pada era *society 5.0* manusia tidak hanya dijadikan obyek (*passive element*), tetapi berperan aktif sebagai subyek (*active player*) yang bekerja bersama *physical system* dalam mencapai tujuan. Berdasarkan hal tersebut, interaksi antara mesin (*physical system*) dan manusia diperlukan untuk menjaga keseimbangan maupun keharmonisan

Hal utama yang harus dicermati adalah bahwa keberhasilan pembangunan perikanan sangat tergantung pada perubahan perilaku pelaku utama dalam menyikapi tantangan tersebut. Selain peningkatan sumberdaya manusia yang berkualitas, penyuluhan perikanan mempunyai kedudukan yang sangat strategis dalam pembangunan perikanan, karena mempunyai tugas dan fungsi untuk menyelenggarakan proses alih informasi dan teknologi (*transfer knowledge*) bagi pelaku utama beserta keluarganya serta anggota masyarakat lainnya. Terlebih lagi,

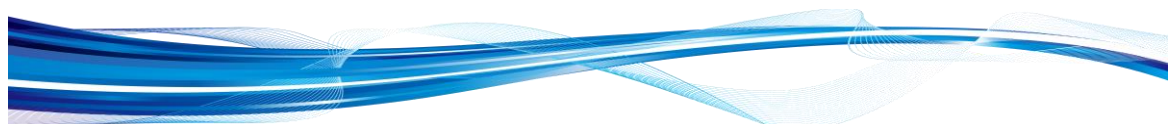


pasca terbitnya Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah pada Lampiran Y Sub Urusan Pengembangan Sumber Daya Manusia Kelautan dan Perikanan, dimana penyelenggaraan penyuluhan perikanan menjadi kewenangan pusat, sehingga BRSDM melalui Pusat Pelatihan dan Penyuluhan KP dan Balai Pelatihan dan Penyuluhan Perikanan sebagai unit satuan kerja harus mampu memainkan peran strategisnya agar penyelenggaraan penyuluhan perikanan dapat berjalan efektif, efisien dan kompeten.

Keberadaan Balai Pelatihan dan Penyuluhan Perikanan (BPPP) Ambon memiliki peran yang strategis dalam mendukung visi dan misi KKP melalui:

1. Peningkatkan keterampilan dan kompetensi SDM sehingga dapat meningkatkan produksi dan produktivitas, nilai tambah dan daya saing produk kelautan dan perikanan secara optimal melalui pelatihan dan sertifikasi;
2. Mewujudkan pelaku utama yang mandiri, kompeten, sadar dan peduli terhadap inovasi teknologi, kelestarian dan keberlanjutan sumberdaya kelautan dan perikanan;
3. Membantu dalam meningkatkan ekonomi para pelaku usaha melalui penumbuhan dan pembentukan usaha mikro, kecil dan koperasi sektor kelautan dan perikanan; serta
4. Meningkatkan pengelolaan alih teknologi bidang kelautan dan perikanan secara efektif dan efisien dan tepat sasaran melalui diseminasi dan pelatihan.

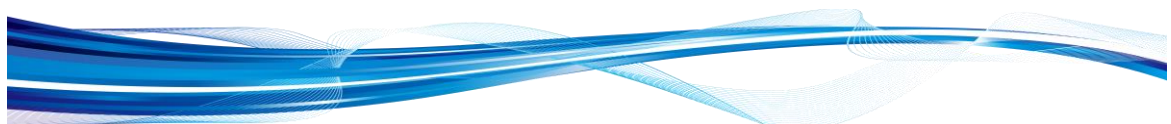
Untuk memastikan keseluruhan program dan kegiatan pembangunan KP tersebut dapat terlaksana sesuai dengan rencana target waktu, kuantitas, kualitas dan sarannya, telah disepakati perjanjian yang tertuang dalam Perjanjian Kinerja



antara Menteri dengan Eselon I dan diturunkan secara berjenjang sampai tingkat individu pegawai, dan telah ditetapkan sampai tingkat daerah (satuan kerja).

Berdasarkan Peraturan Presiden Nomor 29 Tahun 2010 tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (SAKIP), dan Peraturan Menteri PAN dan Reformasi Birokrasi Nomor 53 Tahun 2014 tentang Petunjuk Teknis Perjanjian Kinerja, Pelaporan Kinerja dan Tata Cara Reviu atas Laporan Kinerja Instansi Pemerintah, Balai Pelatihan dan Penyuluhan Perikanan Ambon sebagai salah satu instansi pemerintah berkewajiban menyusun laporan kinerja instansi pemerintah sebagai wujud pertanggungjawaban kinerja Balai Pelatihan dan Penyuluhan Perikanan Ambon dalam pencapaian visi dan misi organisasi.

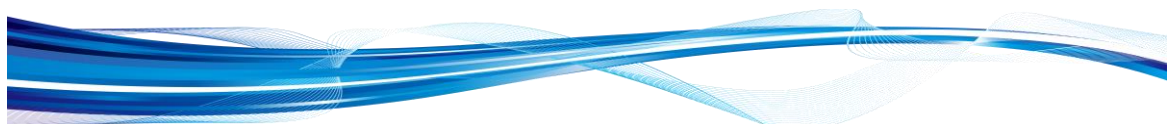
Salah satu prinsip dalam tata cara kelola pemerintahan yang baik (*Good Governance*) adalah akuntabilitas, dimana akuntabilitas adalah sebagai salah satu wujud komitmen Balai Pelatihan dan Penyuluhan Perikanan Ambon dalam mempertanggungjawabkan pengelolaan anggaran dan pengendalian sumberdaya dalam penyelenggaraan pelatihan dan penyuluhan pada akhir periode pengukuran. Penyelenggaraan kegiatan tersebut harus dipertanggungjawabkan kepada publik sebagai pemegang kedaulatan Negara sebagaimana diamanatkan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, yang selanjutnya dipertegas dalam Instruksi Presiden Nomor 7 tahun 1999 tentang Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (AKIP), dimana Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LAPKIN) merupakan salah satu bentuk pertanggungjawaban dalam mewujudkan *Good Governance* di lingkungan Balai Pelatihan dan Penyuluhan Perikanan Ambon.



Balai Pelatihan dan Penyuluhan Perikanan Ambon pada tahun 2021 melaksanakan program kerja dan anggaran Berbasis Kinerja sebagai pelaksanaan Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (SAKIP) PUSLATLUH KP. Proses penyusunan dokumen perencanaan dan anggaran tahunan dilakukan secara terpadu dengan berdasarkan program-program jangka panjang dan menengah KKP khususnya program pelatihan dan penyuluhan KP sebagaimana tertuang dalam Renstra PUSLATLUH KP tahun 2020-2024.

Laporan Kinerja Triwulan I Tahun 2021 Balai Pelatihan dan Penyuluhan Perikanan Ambon pada dasarnya adalah bentuk pertanggungjawaban atas tugas dan fungsi sesuai dengan Peraturan Menteri Kelautan dan Perikanan Nomor 6 Tahun 2017 tentang Organisasi dan Tata Kerja KKP dan kewenangan dalam menyelenggarakan kegiatan pelatihan dan penyuluhan yang disertai dengan pemberdayaan sumberdaya dalam pencapaian visi organisasi.

Sehubungan dengan hal tersebut, lingkup penyusunan laporan kinerja ini adalah memberikan gambaran kondisi objektif atau profil Balai Pelatihan dan Penyuluhan Perikanan Ambon tahun 2020, perencanaan strategis, target dan capaian kinerja serta evaluasi capaian kinerja berdasarkan Penetapan Indikator Kinerja Utama dan/atau Penetapan Kinerja Balai Pelatihan dan Penyuluhan Perikanan Ambon.



1.2 Tujuan

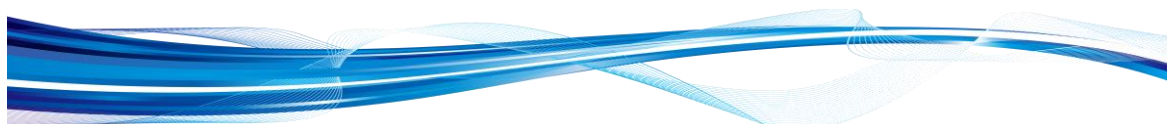
Penyusunan Laporan Kinerja merupakan bentuk akuntabilitas dari pelaksanaan tugas dan fungsi yang dipercayakan kepada setiap instansi pemerintah atas penggunaan anggaran. Laporan Kinerja (LKj) BPPP Ambon Triwulan I Tahun 2021 memenuhi beberapa tujuan, yaitu:

1. Memberikan informasi kinerja yang terukur kepada Kepala PUSLATLUH KP selaku Pemberi Mandat atas pencapaian Kinerja yang telah dan seharusnya dicapai oleh Balai Pelatihan dan Penyuluhan Perikanan Ambon Triwulan I Tahun 2021.
2. Sebagai umpan balik dalam upaya perbaikan berkesinambungan bagi peningkatan kinerja Balai Pelatihan dan Penyuluhan Perikanan Ambon.

1.3 Tugas dan fungsi BPPP Ambon

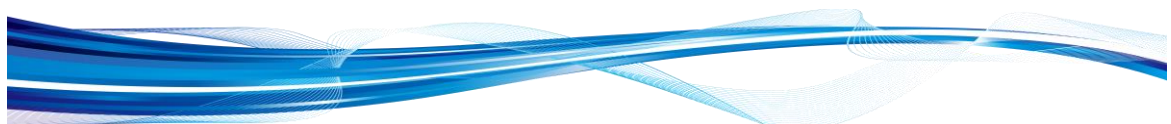
Berdasarkan Peraturan Menteri Kelautan dan Perikanan Nomor PER.87/PERMEN-KP/2020 tentang Organisasi dan Tata Kerja Balai Pelatihan dan Penyuluhan Perikanan merupakan Unit Pelaksana Teknis di bidang pelatihan dan penyuluhan yang ada dibawah dan bertanggung jawab kepada Kepala Badan Riset dan Sumber Daya Manusia Kelautan dan Perikanan Kementerian Kelautan dan Perikanan. BPPP Ambon dalam melaksanakan tugasnya menyelenggarakan fungsi sebagai berikut :

- a. Penyusunan, pemantauan dan evaluasi rencana, program dan anggaran serta pelaporan dibidang pelatihan dan penyuluhan perikanan;
- b. Penyusunan bahan kebijakan pelatihan dan penyuluhan;
- c. Pelatihan teknis dan manajerial dibidang perikanan;
- d. Penyusunan materi, metodologi dan pelaksanaan penyuluhan perikanan;



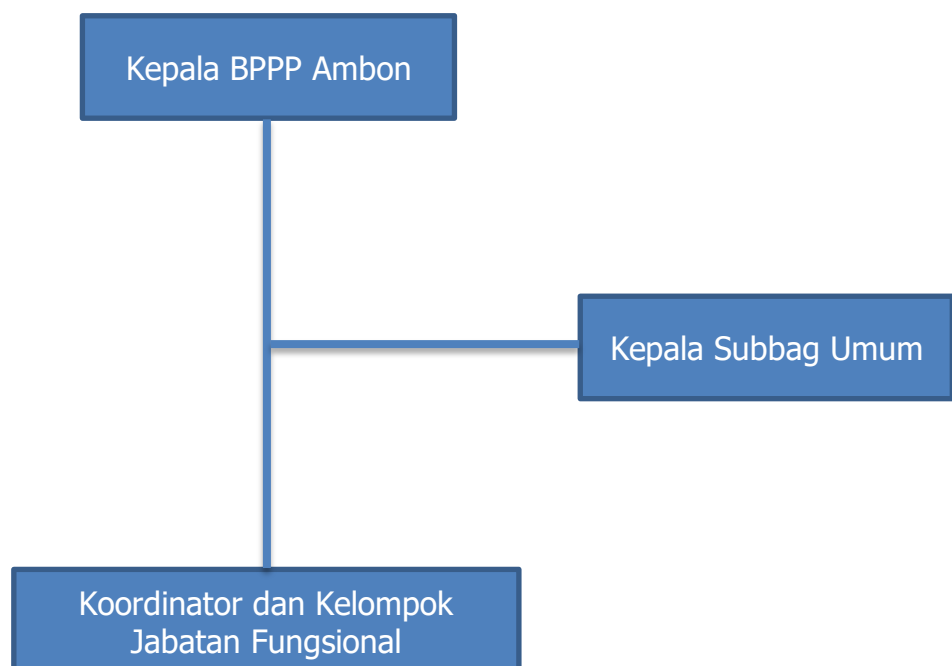
- e. Pemantauan kebutuhan pembentukan jaringan pengembangan tenaga teknis dan manajerial dibidang perikanan;
- f. Pengelolaan prasarana dan sarana pelatihan dan penyuluhan;
- g. Pengembangan dan fasilitasi kelembagaan dan forum masyarakat bagi pelaku utama dan pelaku usaha;
- h. Penyusunan kebutuhan peningkatan kapasitas penyuluh pegawai negeri sipil, swadaya dan swasta; dan
- i. Pelaksanaan urusan ketatausahaan.

Untuk mendukung pelaksanaan Tugas Pokok dan Fungsi tersebut, BPPP Ambon membentuk Struktur Organisasi dan didukung dengan kemampuan sumberdaya manusia perikanan dan sarana prasarana atau fasilitas yang tersedia. Masing-masing bagian mempunyai tugas pokok dan uraian tugas tersendiri. Sub Bagian Umum dengan tugasnya melakukan penyusunan, pemantauan dan evaluasi rencana, program dan anggaran, pelaporan, urusan keuangan, hubungan masyarakat, organisasi dan tata laksana, kepegawaian, persuratan, kearsipan, dokumentasi, rumah tangga, pengelolaan barang milik negara dan perlengkapan, serta pengelolaan prasarana dan sarana pelatihan dan penyuluhan perikanan. Kelompok jabatan fungsional dengan tugasnya memberikan pelayanan fungsional dalam pelaksanaan tugas dan fungsi Balai Pelatihan dan Penyuluhan Perikanan sesuai dengan bidang keahlian dan keterampilan. Dalam pelaksanaan tugas sebagaimana dimaksud, ditetapkan koordinator pelaksana fungsi pelayanan fungsional sesuai dengan ruang lingkup bidang tugas dan fungsi Balai Pelatihan dan Penyuluhan Perikanan Ambon.

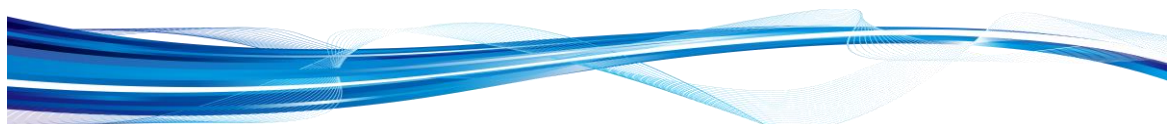


Struktur Organisasi

Berdasarkan Peraturan Menteri Kelautan dan Perikanan Nomor PER.87/KEPMEN- KP/2020 tentang Organisasi dan Tata Kerja Balai Pelatihan dan Penyuluhan Perikanan Ambon, Struktur Organisasi di BPPP Ambon dapat dilihat pada Gambar 1:

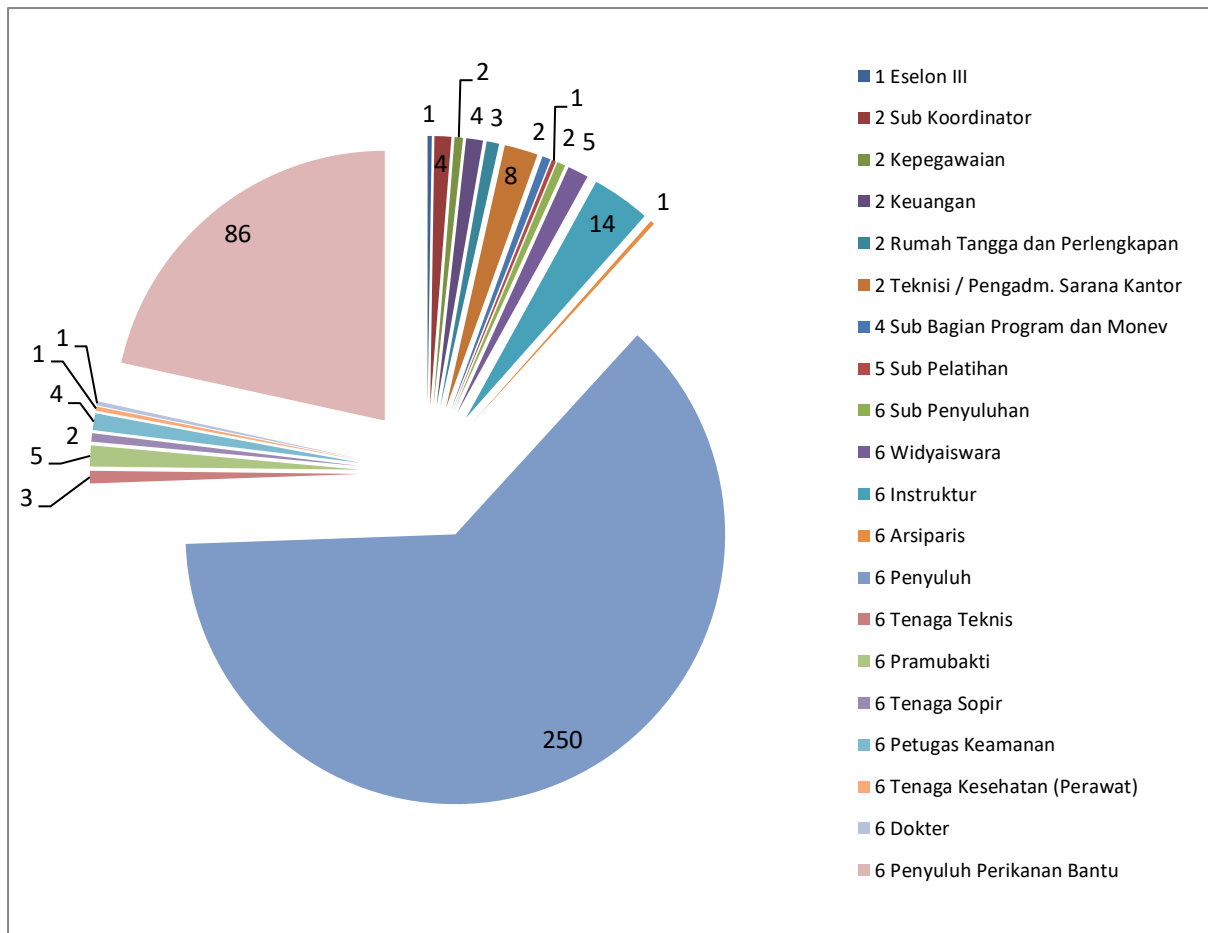


Gambar 1. Struktur Organisasi BPPP Ambon

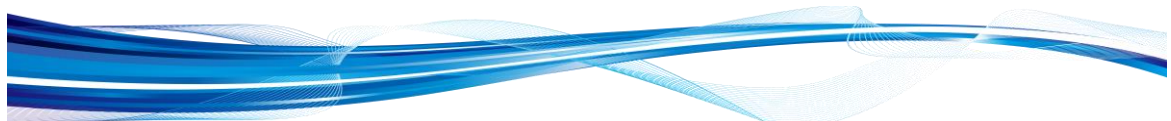


1.4 Keragaan SDM BPPP Ambon

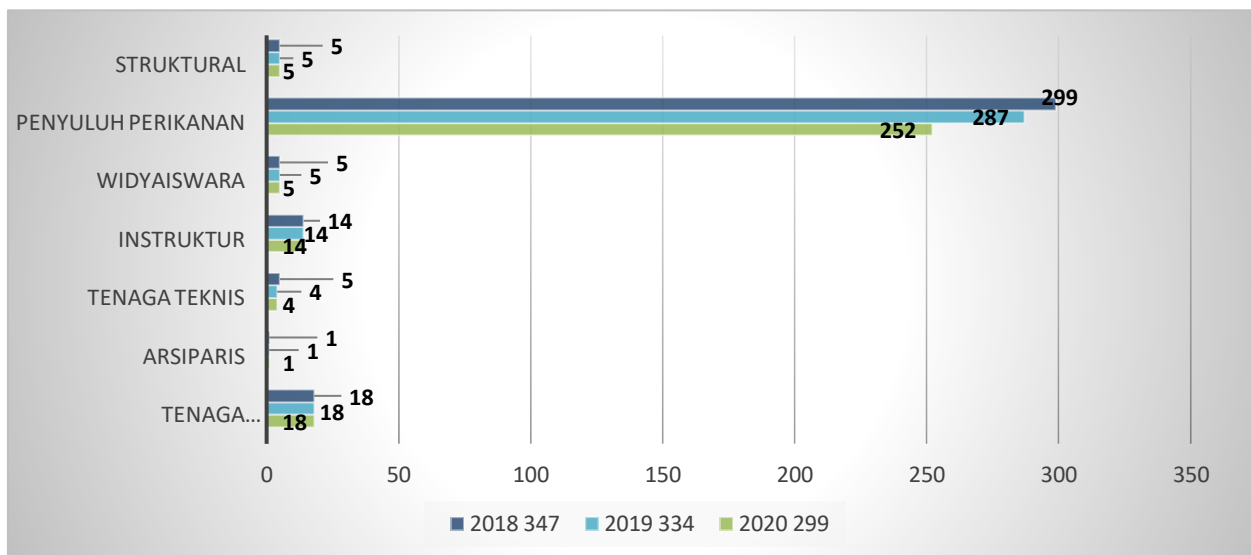
Jumlah pegawai negeri sipil di BPPP Ambon per 31 Maret sebanyak 250 orang dengan rincian komposisi pegawai sebagai berikut :



Gambar 2. Komposisi Pegawai BPPP Ambon



Komposisi pegawai BPPP Ambon per tanggal 31 Maret tahun 2021 dibandingkan dengan tahun sebelumnya dapat dilihat pada Gambar 3 berikut.

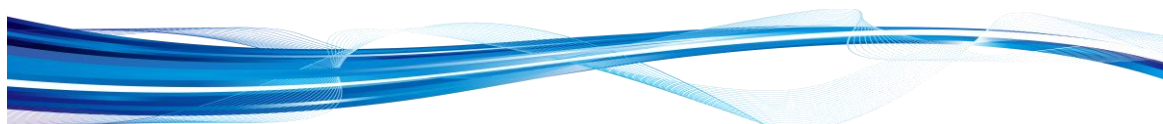


Gambar 3 Komposisi pegawai BPPP Ambon tahun 2021 dibandingkan dengan tahun sebelumnya

1.5 Sistematika Penyajian Laporan Kinerja Instansi Pemerintah

Dasar hukum yang digunakan dalam menyusun Laporan Kinerja (LKj) BPPP Ambon Triwulan I Tahun 2021:

- 1) Ketetapan MPR Nomor XI/MPR/1998 tentang Penyelenggaraan Negara yang Bersih dan Bebas Korupsi, Kolusi, dan Nepotisme;
- 2) PP Nomor 8 tahun 2006 tentang Pelaporan Keuangan dan Kinerja Instansi Pemerintah;



- 3) PP Nomor 29 tahun 2014 tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah
- 4) Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 53 Tahun 2014 tentang Petunjuk Teknis Perjanjian Kinerja, Pelaporan Kinerja dan Tata Cara Reviu Atas Laporan Kinerja.

Berpedoman pada Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Republik Indonesia nomor 53 tahun 2014 tentang Petunjuk Teknis Perjanjian Kinerja, Pelaporan Kinerja dan Tata Cara Reviu atas Laporan Kinerja Instansi Pemerintah. Secara lebih rinci, muatan dokumen LKj ini tergambar dalam sistematika laporan yang tersusun sebagai berikut :

- a. Ikhtisar Eksekutif, menyajikan ringkasan isi laporan kinerja;

- b. Bab I – Pendahuluan,

Penjelasan umum organisasi, dengan penekanan kepada aspek strategis organisasi serta permasalahan utama (*Strategic issued*) yang sedang dihadapi organisasi;

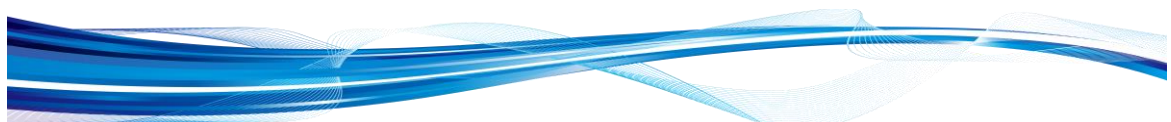
- c. Bab II – Perencanaan Kinerja,

Menguraikan ringkasan/ikhtisar perjanjian kinerja tahun 2020.

- d. Bab III –Akuntabilitas Kinerja, Capaian Kinerja Organisasi

Menguraikan capaian kinerja organisasi untuk setiap pernyataan kinerja sasaran strategis organisasi sesuai dengan hasil pengukuran kinerja organisasi.

Realisasi Anggaran



Menguraikan realisasi anggaran yang telah digunakan untuk mewujudkan kinerja organisasi sesuai dengan dokumen perjanjian kinerja.

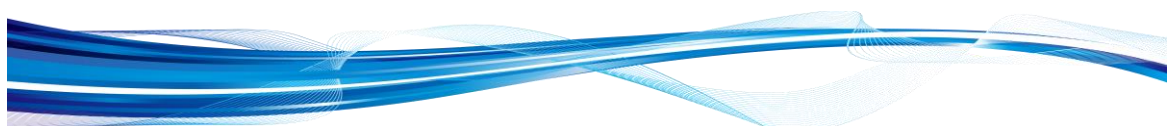
e. Bab IV – Penutup,

Menguraikan kesimpulan umum atas capaian kinerja organisasi serta langkah masa mendatang yang akan dilakukan organisasi untuk meningkatkan kinerjanya.

f. Lampiran,

Perjanjian kinerja,

Lampiran yang dianggap perlu.



BAB II PERENCANAAN KINERJA

2.1 Rencana Strategis

Langkah-langkah strategis jangka menengah yang akan memberikan arah bagi pelaksanaan Kegiatan Peningkatan Dukungan Manajemen dan Pelaksanaan Tugas Teknis Lainnya ini dituangkan dalam perencanaan strategis periode lima tahunan. Rencana Strategis (Renstra) Balai Pelatihan dan Penyuluhan Perikanan Ambon tahun 2020-2024 merupakan dokumen perencanaan strategis Balai Pelatihan dan Penyuluhan Perikanan Ambon yang menjadi acuan dalam pelaksanaan kegiatan dalam kurun waktu lima tahunan. Mengacu pada dokumen Renstra tersebut, Balai Pelatihan dan Penyuluhan Perikanan Ambon membuat perencanaan tahunan guna mencapai indikator sasaran yang telah ditetapkan sesuai dengan kegiatan yang termuat dalam Renstra. Perencanaan tersebut dibuat disertai indikator sasaran dan cara mencapai sasaran tersebut secara strategis baik dalam kurun waktu 1 (satu) tahun maupun 5 (lima) tahunan. Rencana Kerja Tahunan (RKT) dalam dokumen perencanaan kinerja Balai Pelatihan dan Penyuluhan Perikanan Ambon memuat rencana pelaksanaan program dan kegiatan termasuk dukungan pembiayaan yang dibutuhkan dalam pelaksanaan perencanaan. Rencana kerja juga memuat target dan indikator sasaran yang diinginkan dalam pelaksanaan kegiatan.

Rencana strategis Balai Pelatihan dan Penyuluhan Perikanan Ambon tahun 2020-2024 berisi langkah-langkah strategis yang akan memberi arah bagi penyelenggaraan kegiatan pelatihan dan penyuluhan dalam rangka menunjang visi Badan Riset dan Sumberdaya Manusia Kelautan dan Perikanan untuk mewujudkan

masyarakat Kelautan dan Perikanan yang Sejahtera dan Sumber Daya Kelautan dan Perikanan yang Berkelanjutan.

Sesuai dengan kebijakan pembangunan kelautan dan perikanan dan untuk mencapai visi yang tertuang dalam RENSTRA, maka BPPP Ambon telah menetapkan Visi, Misi, Tugas dan Fungsi yaitu :

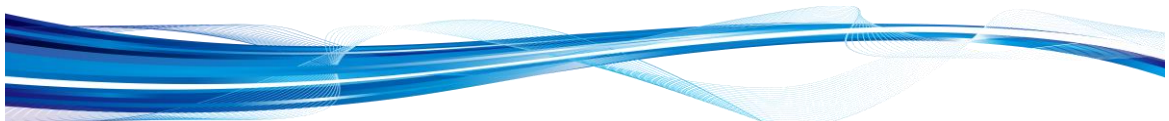
2.1.1 Visi

Visi didasarkan pada visi Indonesia 2045 yaitu mewujudkan Indonesia sebagai negara yang berdaulat, adil dan makmur. Visi Presiden 2020-2024 adalah "Terwujudnya Indonesia Maju yang Berdaulat, Mandiri, dan Berkepribadian, berlandaskan Gotong Royong". Sebagai organisasi yang membantu Presiden untuk urusan kelautan dan perikanan, maka visi KKP 2020-2024 ditetapkan menggunakan visi Presiden.

Visi BRSDM pada tahun 2020-2024 adalah mendukung visi KKP yaitu "Terwujudnya Masyarakat Kelautan dan Perikanan yang Sejahtera dan Sumber Daya Kelautan dan Perikanan yang Berkelanjutan" untuk mewujudkan Indonesia maju yang berdaulat, mandiri, dan berkepribadian, berlandaskan gotong-royong.

Visi Puslatluh KP pada tahun 2020-2024 adalah mendukung visi KKP dan visi BRSDM yaitu "Terwujudnya Masyarakat Kelautan dan Perikanan yang Sejahtera dan Sumber Daya Kelautan dan Perikanan yang Berkelanjutan" untuk mewujudkan Indonesia maju yang berdaulat, mandiri, dan berkepribadian, berlandaskan gotong-royong.

Sejalan dengan Pusat pelatihan dan Penyuluhan KP, visi BPPP Ambon pada tahun 2020-2024 adalah menggunakan Visi BRSDM, yaitu "Terwujudnya



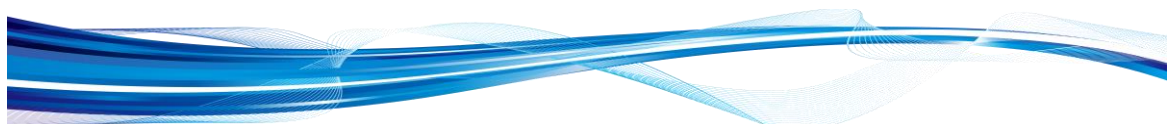
Masyarakat Kelautan dan Perikanan yang Sejahtera dan Sumber Daya Kelautan dan Perikanan yang Berkelanjutan” untuk mewujudkan Indonesia maju yang berdaulat, mandiri, dan berkepribadian, berlandaskan gotong-royong.

2.1.2 Misi

Untuk dapat berkontribusi dalam pencapaian visi Kementerian Kelautan dan Perikanan, maka BPPP Ambon menerapkan misi yang sama dengan Pusat Pelatihan dan Penyuluhan KP yang menjalankan misi Presiden, KKP dan BRSDM dalam bidang kelautan dan perikanan sebagai berikut:

- 1) Misi ke-1 yakni Peningkatan Kualitas SDM KP melalui Peningkatan kompetensi dan pendampingan dalam penerapan hasil inovasi riset Kelautan dan Perikanan;
- 2) Misi ke-2 yakni Struktur Ekonomi Yang Produktif, Mandiri, dan Berdaya Saing melalui pelatihan dan penyuluhan KP guna mendukung peningkatan Kontribusi Ekonomi Sektor Kelautan dan Perikanan terhadap Perekonomian Nasional;
- 3) Misi ke-4 yakni Mencapai Lingkungan Hidup Yang Berkelanjutan melalui pelatihan dan penyuluhan KP guna mendukung Sumber Daya Kelautan dan Perikanan yang lestari;
- 4) Misi ke-8 yakni Pengelolaan Pemerintahan yang Bersih, Efektif, dan Terpercaya melalui Peningkatan Tata Kelola Pemerintahan di KKP.

Implementasi dari visi dan misi Presiden dilakukan secara bertanggungjawab berlandaskan gotong royong, sehingga saling memperkuat, memberi manfaat dan menghasilkan nilai tambah ekonomi, sosial dan budaya bagi kepentingan bersama.



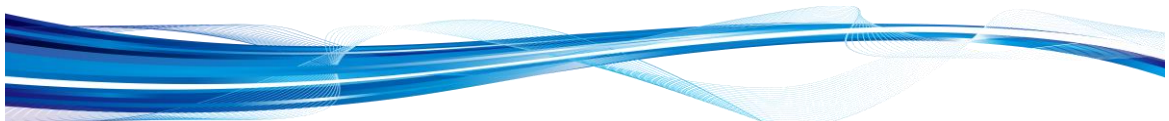
2.1.3 Tujuan

Tujuan pelatihan dan penyuluhan kelautan dan perikanan yang merupakan penjabaran dari visi dan misi KKP yang ingin dicapai selama tahun 2020-2024 adalah sebagai berikut:

- 1) Menghasilkan SDM profesional dan berdaya saing guna mewujudkan pembangunan sektor KP berkelanjutan, didukung tata kelola pemerintahan yang bersih dan melayani.
- 2) Meningkatkan produktivitas, efisiensi usaha, pendapatan dan kesejahteraan pelaku utama dan pelaku usaha serta meningkatkan kesadaran dalam pelestarian fungsi lingkungan hidup melalui penyelenggaraan penyuluhan.
- 3) Meningkatkan pemanfaatan inovasi teknologi mendukung industrialisasi KP yang berdaya saing.
- 4) Menyelenggarakan fungsi kelembagaan dan menajerial SDM sesuai tata kelola pemerintahan yang baik.

2.1.4 Sasaran Strategis

Renstra BPPP Ambon tahun 2020 – 2024 menjelaskan bahwa sasaran strategis pembangunan kelautan dan perikanan melalui pelaksanaan program pelatihan dan penyuluhan merupakan kondisi yang diinginkan dapat dicapai oleh BPPP Ambon sebagai suatu *outcome/impact* dari program yang dilaksanakan, dengan menggunakan pendekatan metode *Balanced Scorecard* (BSC) yang dibagi dalam empat perspektif, yaitu *Stakeholder Perspective*, *Customer Perspective*, *Internal Process Perspective*, dan *Learning and Growth Perspective*.



- 1) Terlaksananya pendampingan kelompok pelaku usaha/utama dalam mendukung terwujudnya kesejahteraan masyarakat KP.

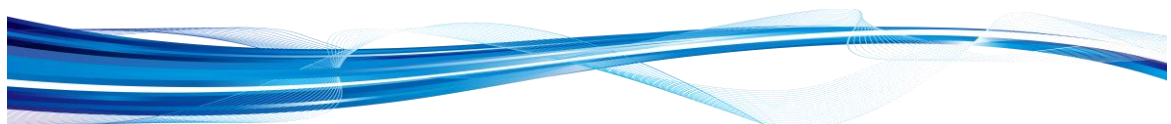
Mewujudkan masyarakat perikanan yang sejahtera melalui pendampingan kelompok oleh penyuluh perikanan adalah tujuan yang ingin dicapai BPPP Ambon pada masa kerja 5 tahun mendatang. Keberhasilan pencapaian tujuan ini ditandai dengan indikator kinerja sebagai berikut :

- a) Tersuluhnya kelompok pelaku utama/usaha sebanyak 14.137 kelompok selama 2020-2024;
 - b) Kelompok yang dinilai kelas kelompoknya sebanyak 319 kelompok selama 2020- 2024;
 - c) Calon kelompok pelaku utama yang disiapkan untuk ditumbuhkan menjadi kelompok pelaku utama perikanan sebanyak 485 kelompok selama 2020-2024.
- 2) Pelatihan dan penyuluhan mendukung hasil riset dan inovasi yang dimanfaatkan.

Meningkatkan kualitas penyelenggaraan pelatihan dan penyuluhan kelautan dan perikanan dengan memanfaatkan teknologi hasil inovasi riset kelautan dan perikanan. Indikator yang ditargetkan adalah adanya desa mitra yang menerapkan ilmu pengetahuan dan teknologi hasil riset dan inovasi BRSDM sebanyak 1 desa setiap tahun selama 2020-2024;

- 3) Kapasitas dan kompetensi SDM KP yang meningkat.

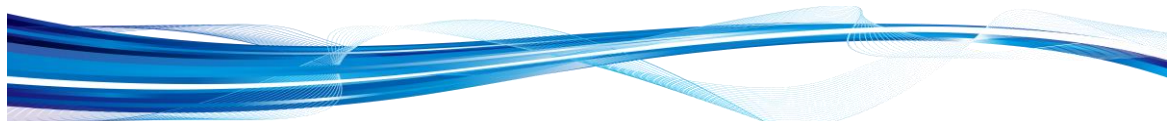
Meningkatnya kompetensi SDM KP adalah tujuan utama pelatihan dan



penyuluhan perikanan yang dilakukan oleh BPPP Ambon. Untuk mengetahui pencapaian tujuan itu, indikator yang digunakan selama 2020 – 2024 adalah sebagai berikut :

- a) Persentase Lulusan pendidikan dan pelatihan yang terserap di Dunia Usaha dan Dunia Industri sebanyak 60%.
 - b) Lulusan pendidikan dan pelatihan yang membentuk start up (usaha rintisan) sebanyak 76 orang.
 - c) SDM KP yang dilatih sebanyak 8.765 orang.
 - d) Masyarakat KP yang bersertifikat kompetensi sebanyak 1.300 orang.
 - e) Percontohan penyuluhan KP yang diterapkan sebanyak 27 unit.
 - f) Sarana dan prasarana Puslatluh yang ditingkatkan kapasitasnya sebanyak 4 unit.
 - g) Sertifikasi Kelembagaan Pelatihan dan Penyuluhan sesuai standar lembaga diklat sebanyak 5 lembaga.
 - h) Usaha Mikro Kecil dan Koperasi Sektor KP yang dibina di BPPP Ambon (unit) sebanyak 2.720 unit.
- 4) Tatakelola pemerintahan yang baik

Balai Pelatihan dan Penyuluhan Perikanan Ambon ingin menjadi instansi yang memiliki kinerja yang semakin membaik dari tahun ke tahun. Untuk itu, tujuan ini adalah mutlak untuk menyempurnakan kekurangan yang dimiliki dengan indicator keberhasilan sebagai berikut :



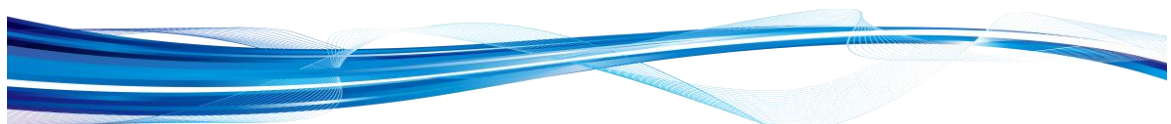
- a) Indeks Profesionalitas ASN lingkup PuslatluhKP sebesar 72.
- b) Persentase unit kerja yang menerapkan sistem manajemen pengetahuan yang terstandar lingkup PuslatluhKP sebesar 82%.
- c) Nilai Kinerja Pelaksanaan Anggaran BRSDM adalah 88 atau baik.
- d) Batas tertinggi persentase nilai temuan LHP BPK atas LK tahun lalu dibandingkan realisasi anggaran TA. lalu sebesar 1 %.
- e) Nilai Kinerja Anggaran Puslatluh KP sebesar minimal 8

2.1.5 Potensi dan Permasalahan

2.1.5.1 Potensi

Pengembangan sumberdaya manusia (SDM) dibidang kelautan dan perikanan memiliki peran strategis dalam mendukung pencapaian target kinerja pembangunan kelautan dan perikanan. Peran strategis tersebut dilaksanakan melalui kegiatan pendidikan, pelatihan dan penyuluhan serta riset kelautan dan perikanan yang diarahkan untuk mendorong dan mempercepat peningkatan kapasitas sumber daya manusia kelautan dan perikanan.

Balai Pelatihan dan Penyuluhan Perikanan (BPPP) Ambon bertugas melaksanakan kegiatan Pelatihan Kelautan dan Perikanan pada wilayah kerjanya di 5 (lima) propinsi di Indonesia. Wilayah kerja BPPP Ambon yaitu propinsi Maluku, Maluku Utara, Sulawesi Tenggara, Papua Barat, dan Papua. Kegiatan Pelatihan ditujukan kepada masyarakat kelautan dan perikanan yaitu pelaku utama dan pelaku usaha di sektor



penangkapan, budidaya, pengolahan, pemasaran hasil perikanan, serta masyarakat kelautan dan perikanan lainnya.

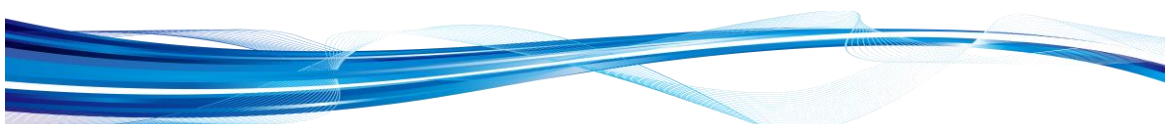


Gambar 4 Wilayah Kerja BPPP Ambon

BPPP Ambon juga membawahi Penyuluh Perikanan pada 4 (empat) Provinsi meliputi Provinsi Maluku, Maluku Utara, Papua, dan Papua Barat. BPPP Ambon bertugas menyiapkan bahan pengembangan penyuluhan dan pelaksanaan penyuluhan, serta penyusunan kebutuhan peningkatan kapasitas penyuluh PNS, swadaya dan swasta.

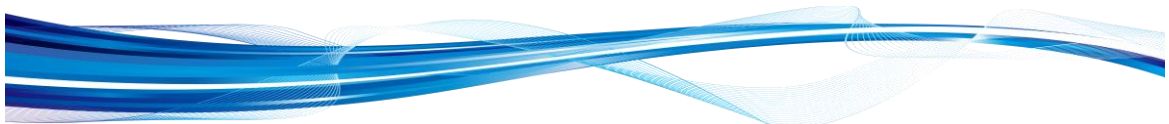
Keberhasilan pencapaian target ditentukan oleh sumberdaya yang dimiliki oleh suatu organisasi. Berikut adalah potensi sumberdaya BPPP Ambon dalam mencapai tujuan organisasi :

- 1) BPPP Ambon berada pada posisi yang sangat strategis di Kota Ambon, tepatnya di Jl.Martha Alfons, Poka, Kecamatan Teluk



Ambon. Sebelah selatan berbatasan dengan Pantai Teluk Ambon, sebelah Utara berbatasan dengan Universitas Pattimura, sebelah barat dicapai dengan jalur darat melalui Wayame dan Rumah Tiga, Sebelah Timur dicapai dengan kapal feri penyebarangan Galala-Poka

- 2) Memiliki workshop yang lengkap untuk setiap bidang pelatihan;
- 3) BPPP Ambon memiliki instalasi budidaya ikan air tawar yang strategis untuk pengembangan budidaya ikan air tawar;
- 4) Memiliki SDM yang memiliki kapasitas dan kompetensi di bidangnya (5 orang widyaiswara, 14 orang instruktur, 4 orang tenaga teknis/pelatih, dan 250 orang penyuluh perikanan PNS serta 86 orang penyuluh perikanan bantu);
- 5) Sebagian besar SDM BPPP Ambon memiliki usia muda yang produktif;
- 6) BPPP Ambon tersertifikasi ISO 9001:2015;
- 7) Tersedianya Standar Operasional Prosedur (SOP) penyelenggaraan diklat sesuai manajemen mutu ;
- 8) Memiliki akreditasi dari Direktorat Perhubungan Laut, Kementerian Perhubungan untuk menyelenggarakan diklat *Basic Safety Training* (BST);
- 9) Adanya mandat dari Lembaga Sertifikasi Profesi Kelautan dan Perikanan kepada BPPP Ambon sebagai Tempat Uji Kompetensi



(TUK);

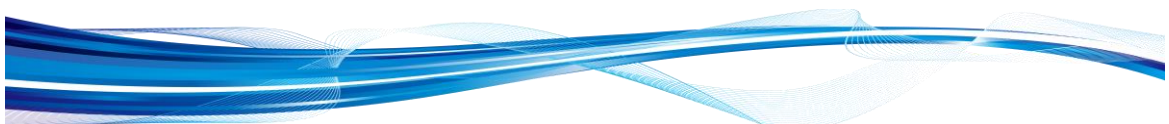
- 10) BPPP Ambon sebagai Lembaga Sertifikasi Profesi 1 sehingga dapat menerbitkan sertifikat kompetensi sendiri;
- 11) SDM Asesor BPPP Ambon sebanyak 39 orang sehingga akan mampu melaksanakan uji kompetensi dengan jumlah peserta yang banyak;
- 12) BPPP Ambon mampu membuat sarana produksi perikanan tertentu;
- 13) BPPP Ambon mampu menghasilkan produk hasil perikanan yang layak dipasarkan;

2.1.5.2 Permasalahan

Sebagai Lembaga pelatihan dan penyuluhan yang terus berkembang menjadi pilihan utama stakeholder dalam rangka peningkatan kualitas sumberdaya manusia kelautan dan perikanan, BPPP Ambon memiliki beberapa hal yang penting untuk diperbaiki antara lain :

Aspek penyelenggaraan pelatihan KP :

- 1) Ketersediaan tenaga pelatih (instruktur dan widyaiswara) yang terus berkurang dikarenakan beberapa sudah memasuki usia purnatugas dan mutasi;
- 2) Sarana dan prasarana pelatihan belum sesuai dengan standar minimal pelatihan yang ditetapkan dan tidak lagi sesuai dengan perkembangan teknologi saat ini;
- 3) Kurikulum dan modul belum seluruhnya tersedia dan terstandarisasi.



4) Kurangnya program pengembangan SDM pelatih.

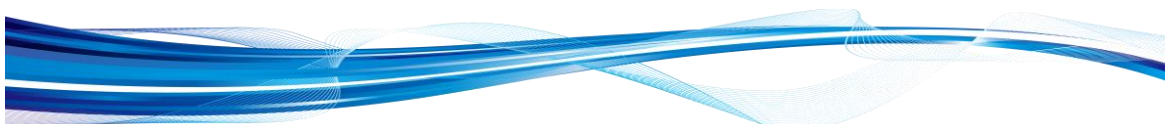
Sedangkan aspek penyelenggaraan penyuluhan :

- 1) Kelembagaan penyuluhan perikanan belum berjalan dengan optimal;
- 2) Kualitas dan kuantitas penyebaran penyuluh perikanan masih belum memadai;
- 3) Kuantitas dan kualitas materi penyuluhan perikanan masih terbatas dalam aksesibilitasnya;
- 4) Sarpras penyuluhan belum mencukupi kebutuhan pelaksanaan tugas penyuluh;
- 5) Pembiayaan penyelenggaraan penyuluhan masih terbatas;
- 6) Legislasi dan regulasi belum seluruhnya tersedia;
- 7) Batasan peran pemerintah daerah belum jelas, terutama terkait penyelenggaraan penyuluhan pasca UU No.23 Tahun 2014 tentang Pemerintah Daerah.

2.2 Rencana Kerja Tahun 2021

Dalam rangka mewujudkan visi dan misi pada Rencana Strategis, BPPP Ambon didukung dengan anggaran sebesar Rp 50.366.238.000. Dukungan anggaran tersebut berupa kegiatan :

a. Inovasi yang diterapkan sebagai percontohan Penyuluhan Kelautan dan



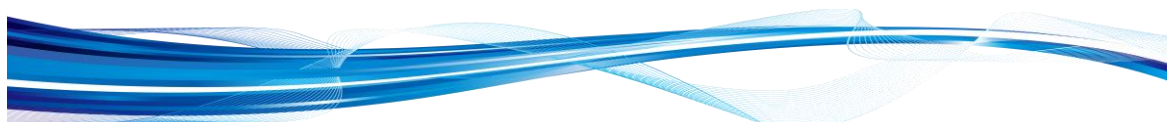
Perikanan Rp. 57.333.000

- b. Kelompok Pelaku Utama/Usaha Yang Mendapatkan Pendampingan Dari Penyuluhan KP Rp. 4.702.036.000
- c. Sarana Pelatihan dan Penyuluhan Kelautan dan Perikanan Rp. 1.095.823.000
- d. Prasarana Pelatihan dan Penyuluhan Kelautan dan Perikanan Rp. 1.604.177.000
- e. Masyarakat Kelautan dan Perikanan Yang Dilatih Rp. 2.512.680.000
- f. Layanan Perkantoran Pelatihan dan Penyuluhan Kelautan dan Perikanan Rp. 40.108.878.000
- g. Layanan Perencanaan dan Penganggaran Internal Rp. 18.000.000
- h. Layanan Umum Rp. 251.111.000
- i. Layanan Monitoring dan Evaluasi Internal Rp. 16.200.000

2.3 Penetapan Kinerja Tahun 2021

Penetapan Kinerja merupakan amanat Inpres Nomor 5 Tahun 2004 dan Surat Edaran Menteri Negara PAN& RB Nomor: SE/31/M.PAN/12/2004 tentang Penetapan Kinerja. Penetapan Kinerja sendiri pada dasarnya adalah pernyataan komitmen yang diimplementasikan tekad dan janji untuk mencapai kinerja yang jelas dan terukur dalam rentang waktu tertentu dengan mempertimbangkan sumber daya yang dikelolanya.

Penetapan Indikator Kinerja Utama di lingkungan instansi pemerintah memiliki tujuan :



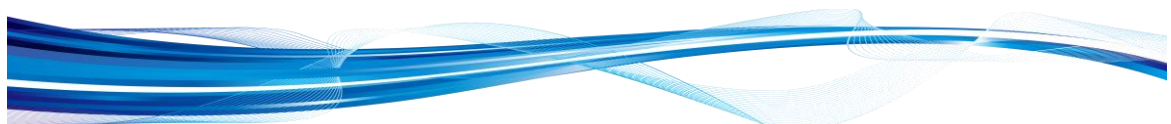
- a. Untuk memperoleh informasi kinerja yang penting dan diperlukan dalam menyelesaikan manajemen kinerja secara baik,
- b. Untuk mengontrol serta mengevaluasi tingkat keberhasilan dari pencapaian suatu tujuan dan sasaran strategis organisasi yang digunakan untuk perbaikan kinerja dan peningkatan akuntabilitas kinerja.

Penetapan kinerja didalam laporan kinerja ini sudah didasarkan pada analisis *Balance Score Card* (BSC). Penetapan Kinerja Balai Pelatihan dan Penyuluhan Perikanan Ambon tahun 2021 disusun berdasarkan pada Rencana Kinerja Tahun 2019 yang telah ditetapkan pada Januari 2021. Penetapan Kinerja ini merupakan tolok ukur evaluasi akuntabilitas kinerja pada akhir tahun 2021.

Tabel 1. Penetapan Kinerja BPPP Ambon tahun 2021

NO	SASARAN KEGIATAN	NO	INDIKATOR KINERJA	TARGET
1	Pendampingan kelompok pelaku usaha/utama dalam mendukung terwujudnya kesejahteraan masyarakat KP	1	Kelompok kelautan dan perikanan yang ditingkatkan kelasnya di Satminkal BPPP Ambon (Kelompok)	35
		2	Kelompok kelautan dan perikanan yang dibentuk di Satminkal BPPP Ambon (Kelompok)	100
2	Kapasitas dan kompetensi SDM KP meningkat	3	Desa/kawasan mitra yang menerapkan Iptek di BPPP Ambon (paket)	1
		4	Persentase lulusan pendidikan dan pelatihan yang terserap di Dunia Usaha dan Dunia Industri BPPP Ambon (%)	60
		5	Lulusan pelatihan yang membentuk start up (usaha rintisan) BPPP Ambon (orang)	10

NO	SASARAN KEGIATAN	NO	INDIKATOR KINERJA	TARGET
3	Tersedianya Sarana dan Prasarana Pelatihan dan Penyuluhan KP Yang Terstandar	6	Jumlah Sarana pelatihan dan penyuluhan KP yang terstandar di BPPP Ambon (unit)	1
		7	Jumlah Prasarana pelatihan dan penyuluhan KP yang terstandar di BPPP Ambon (unit)	1
4	Terselenggaranya Penyuluhan Kelautan dan Perikanan	8	Jumlah Kelompok Pelaku utama/ Pelaku Usaha yang disuluh di BPPP Ambon (kelompok)	2.518
		9	Jumlah Percontohan Penyuluhan Kelautan dan Perikanan yang diterapkan di BPPP Ambon (unit)	1
5	Terselenggaranya Pelatihan SDM Kelautan dan Perikanan	10	Jumlah masyarakat kelautan dan perikanan yang dilatih BPPP Ambon (orang)	2.893
		11	Pelaksanaan Pelatihan Masyarakat Berbasis "Full Online Training" BPPP Ambon (paket)	20
		12	Tersedianya Materi Pelatihan berbasis Kaji Widya di BPPP Ambon (Paket)	4
		13	Sertifikasi Kelembagaan Pelatihan dan Penyuluhan sesuai standar lembaga pelatihan di BPPP Ambon (lembaga)	1
6	Tatakelola pemerintahan yang baik lingkup BPPP Ambon	14	Persentase layanan dukungan manajemen internal BPPP Ambon (%)	100
		15	Nilai Rekonsiliasi Kinerja BPPP Ambon (Nilai)	80
		16	Persentase unit kerja yang menerapkan sistem manajemen pengetahuan yang terstandar BPPP Ambon (%)	84
		17	Indeks Profesionalitas ASN BPPP Ambon (indeks)	73
		18	Persentase penyelesaian temuan LHP BPK BPPP Ambon (%)	100



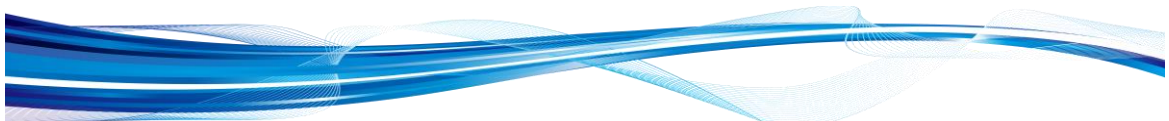
NO	SASARAN KEGIATAN	NO	INDIKATOR KINERJA	TARGET
		19	Nilai Kinerja Pelaksanaan Anggaran BPPP Ambon (nilai)	89
		20	Nilai Kinerja Anggaran BPPP Ambon (nilai)	86

2.4 Pengukuran Kinerja

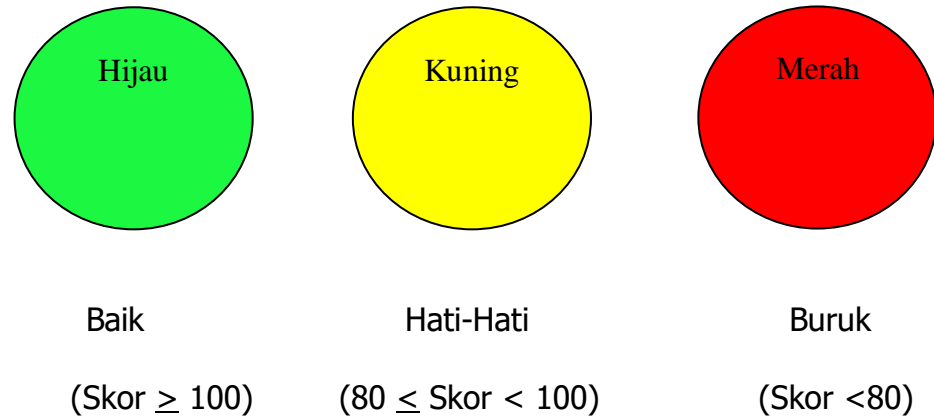
2.4.1 Rumus Pengukuran

Pengukuran capaian kinerja BPPP Ambon Tahun 2021, dilakukan dengan membandingkan antara target (rencana) dengan realisasi pada masing-masing indikator kinerja, akan diperoleh indeks capaian IKU. Penghitungan indeks capaian IKU perlu memperhitungkan jenis polarisasi IKU yang berlaku yaitu *maximize*, *minimize*, dan *stabilize*. Ketentuan penetapan indeks capaian IKU adalah :

- a. Angka maksimum adalah 120;
- b. Angka minimum adalah 0;
- c. Formulasi penghitungan indeks capaian IKU untuk setiap jenis polarisasi adalah berbeda;



Adapun status indeks capaian IKU seperti gambar 5 sebagai berikut :



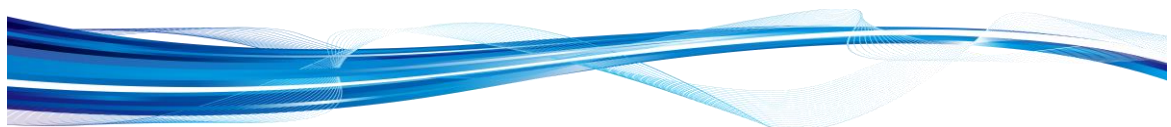
Gambar 5. Status indeks capaian IKU

Pengukuran kinerja dilakukan dengan mengacu kepada Manual IKU pada masing- masing Indikator yang ada dalam dokumen *Balanced Score Card* (BSC).

2.4.2 Metode Pengukuran Kinerja

Metode pengukuran kinerja lingkup BPPP Ambon dilakukan secara berkala setiap 3 (tiga) bulan sekali (triwulanan), yaitu pada bulan Maret (B03), Juni (B06), September (B09) dan Desember (B12), serta tahunan pada akhir tahun anggaran. Pengukuran ditugaskan kepada Tim Pengelola Kinerja Instansi Pemerintah yang ditetapkan melalui Surat Keputusan Kepala BPPP Ambon Nomor 19/BPPP/KP.110/I/2021 tentang Tim Penyusunan laporan Kinerja BPPP Ambon Tahun 2020 dan Triwulanan Tahun 2021. Keanggotaan tim terdiri dari pejabat dan staf yang mewakili semua bagian lingkup BPPP

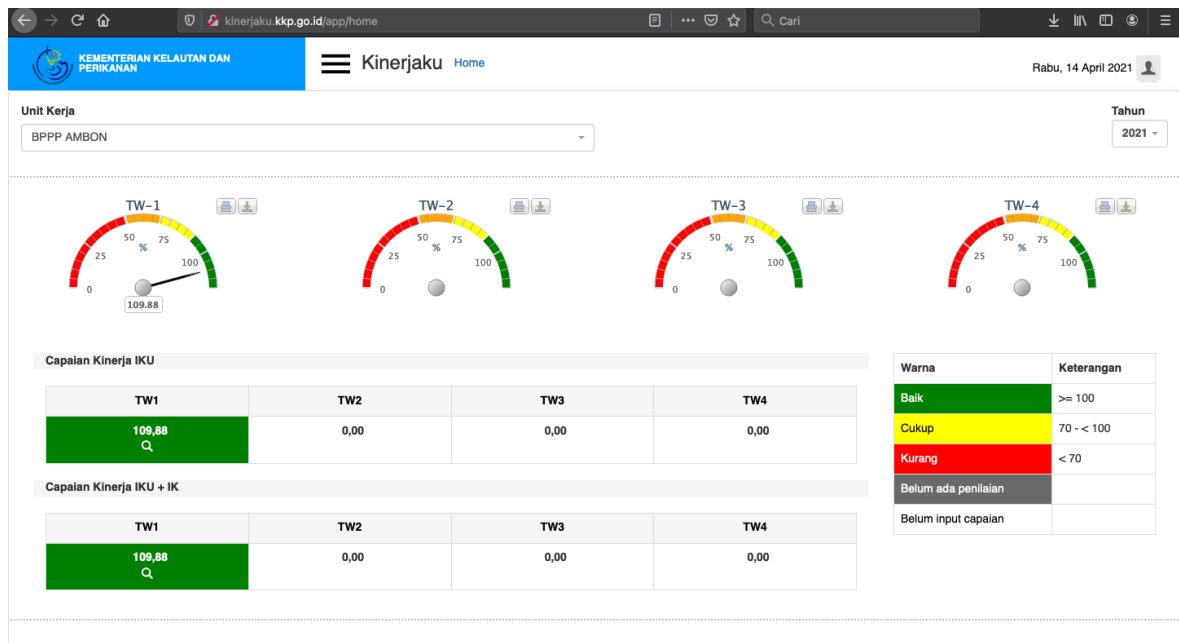
Ambon. Berdasarkan laporan bagian penanggung jawab kegiatan, Kepala Balai c.q. Bagian Program, Monitoring dan Evaluasi merangkum seluruh hasil yang dicapai dan melakukan evaluasi untuk mengendalikan pencapaian pelaksanaan program/kegiatan secara keseluruhan.



BAB III. AKUNTABILITAS KINERJA

3.1 Prestasi Kinerja

Pengukuran capaian kinerja BPPP Ambon Triwulan I tahun 2021 dilakukan dengan cara membandingkan antara target (rencana) dan realisasi indikator kinerja utama (key performance indicator, disingkat KPI) pada masing-masing perspektif. Pencatatan dan pengukuran kinerja dilakukan dengan bantuan perangkat lunak berbasis balanced scorecard dari Kementerian Kelautan Perikanan, yaitu pada <http://kinerjaku.kkp.go.id>. Dari hasil pengukuran kinerja tersebut, diperoleh data capaian kinerja BPPP Ambon di tingkat korporat triwulan I tahun 2021 sebesar 109,88%, sebagaimana dashboard kinerjaku sebagai berikut:



Gambar 6. Dashboard Kinerjaku Level 3 BPPP Ambon

Selama Triwulan I tahun 2021, dari 20 IKU BPPP Ambon, seluruh target IKU yang telah direncanakan telah berwarna hijau. Itu artinya seluruh target yang telah ditetapkan telah tercapai semua.

3.2 Evaluasi dan Analisis Kinerja

Salah satu fondasi utama dalam menerapkan manajemen kinerja adalah pengukuran kinerja dalam rangka menjamin adanya peningkatan dalam pelayanan publik dan meningkatkan akuntabilitas dengan melakukan klarifikasi output dan outcome yang akan dan seharusnya dicapai untuk memudahkan terwujudnya organisasi yang akuntabel. Pengukuran kinerja digunakan sebagai dasar untuk menilai keberhasilan atau kegagalan pelaksanaan kegiatan program sesuai dengan sasaran yang telah ditetapkan dalam rangka mewujudkan visi dan misi BRSDM KP. Pengukuran kinerja dimaksud merupakan hasil dari suatu penilaian yang didasarkan pada Indikator Kinerja Utama (IKU) yang telah diidentifikasi agar sasaran-sasaran strategis dan tujuan strategi sebagaimana telah ditetapkan dalam Peta Strategi BPPP Ambon yang menjadi kontrak kinerja pada Tahun 2020 dapat tercapai. BPPP Ambon pada tahun 2020 memiliki beberapa kegiatan prioritas dengan capaian kinerja atas kegiatan prioritas tersebut dapat dilihat pada tabel berikut ini.

Tabel 2. Capaian IKU triwulan 1 tahun 2021

NO	SASARAN KEGIATAN	NO	INDIKATOR KINERJA	TARGET 2021	REALISASI TW 1	% REALISASI
1	Pendampingan kelompok pelaku usaha/utama dalam mendukung terwujudnya kesejahteraan masyarakat KP	1	Kelompok kelautan dan perikanan yang ditingkatkan kelasnya di Satminkal BPPP Ambon (Kelompok)	35	0	0
		2	Kelompok kelautan dan perikanan yang dibentuk di Satminkal BPPP Ambon (Kelompok)	100	10	10
2	Kapasitas dan kompetensi SDM KP meningkat	3	Desa/kawasan mitra yang menerapkan Iptek di BPPP Ambon (paket)	1	0	0
		4	Persentase lulusan pendidikan dan pelatihan yang terserap di Dunia Usaha dan Dunia Industri BPPP Ambon (%)	60	0	0
		5	Lulusan pelatihan yang membentuk start up (usaha rintisan) BPPP Ambon (orang)	10	0	0
3	Tersedianya Sarana dan Prasarana Pelatihan dan Penyuluhan KP Yang Terstandar	6	Jumlah Sarana pelatihan dan penyuluhan KP yang terstandar di BPPP Ambon (unit)	1	0	0
		7	Jumlah Prasarana pelatihan dan penyuluhan KP yang terstandar di BPPP Ambon (unit)	1	0	0
4	Terselenggaranya Penyuluhan Kelautan dan Perikanan	8	Jumlah Kelompok Pelaku utama/ Pelaku Usaha yang disuluh di BPPP Ambon (kelompok)	2.518	851	33,80
		9	Jumlah Percontohan Penyuluhan Kelautan dan Perikanan yang diterapkan di BPPP Ambon (unit)	1	0	0
5	Terselenggaranya Pelatihan SDM Kelautan dan Perikanan	10	Jumlah masyarakat kelautan dan perikanan yang dilatih BPPP Ambon (orang)	2.893	450	15,55
		11	Pelaksanaan Pelatihan Masyarakat Berbasis "Full Online Training" BPPP Ambon (paket)	20	4	20
		12	Tersedianya Materi Pelatihan berbasis Kaji Widya di BPPP Ambon (Paket)	4	0	0
		13	Sertifikasi Kelembagaan Pelatihan dan Penyuluhan sesuai standar lembaga pelatihan di BPPP Ambon (lembaga)	1	0	0

NO	SASARAN KEGIATAN	NO	INDIKATOR KINERJA	TARGET 2021	REALISASI TW 1	% REALISASI
6	Tatakelola pemerintahan yang baik lingkup BPPP Ambon	14	Persentase layanan dukungan manajemen internal BPPP Ambon (%)	100	0	0
		15	Nilai Rekonsiliasi Kinerja BPPP Ambon (Nilai)	80	0	0
		16	Persentase unit kerja yang menerapkan sistem manajemen pengetahuan yang terstandar BPPP Ambon (%)	84	100	119,04
		17	Indeks Profesionalitas ASN BPPP Ambon (indeks)	73	0	0
		18	Persentase penyelesaian temuan LHP BPK BPPP Ambon (%)	100	0	0
		19	Nilai Kinerja Pelaksanaan Anggaran BPPP Ambon (nilai)	89	98,11	110,24
		20	Nilai Kinerja Anggaran BPPP Ambon (nilai)	86	0	0

Salah satu misi BRSDMKP dalam mendukung visi Kementerian adalah peningkatan kualitas SDM KP melalui peningkatan kompetensi dan pendampingan dalam penerapan hasil inovasi riset Kelautan dan Perikanan. Dengan fokus kesejahteraan masyarakat dengan didukung oleh pembangunan kelautan dan perikanan yang berdaya saing dan berkelanjutan maka sasaran strategis tersebut menjadi tujuan utama pencapaian Balai Pelatihan dan Penyuluhan Perikanan (BPPP) Ambon dengan didukung oleh 3 (tiga) indikator kinerja utama atas sasaran strategis tersebut. BPPP Ambon sebagai bagian dari pembangunan kelautan dan perikanan melalui peningkatan kompetensi dan pendampingan bertanggung jawab sesuai tugas dan fungsi atas pencapaian sasaran strategis tersebut dengan dukungan alokasi anggaran pada setiap IKU sasaran strategis tersebut

melalui peningkatan kompetensi dan pendampingan dengan sentuhan kegiatan penyuluhan KP.

1. Sasaran Kegiatan 1 : Pendampingan kelompok pelaku usaha/utama dalam mendukung terwujudnya kesejahteraan masyarakat KP

Untuk mencapai sasaran kegiatan Pendampingan kelompok pelaku usaha/utama dalam mendukung terwujudnya kesejahteraan masyarakat KP terdapat 2 indikator kinerja yang ditetapkan yaitu IKU 1 : Kelompok kelautan dan perikanan yang ditingkatkan kelasnya di satminkal BPPP Ambon (Kelompok) dan IKU 2 : Kelompok kelautan dan perikanan yang dibentuk di Satminkal BPPP Ambon (Kelompok).

a) IKU 1 : Kelompok kelautan dan perikanan yang ditingkatkan kelasnya di satminkal BPPP Ambon (Kelompok)

Merupakan indikator yang menunjukkan jumlah kelompok pelaku utama/pelaku usaha KP yang meningkat kelas kelompoknya sesuai dengan Kepmen KP No. 14 Tahun 2012 tentang Pedoman Umum Penumbuhan dan Pengembangan Kelembagaan Pelaku Utama Perikanan.

IKU ini sudah ada sejak tahun 2018 pada saat penyuluh perikanan di daerah bergabung dengan pusat sehingga terbentuk Satuan Administrasi Pangkal di BPPP Ambon pada tahun 2017, akan tetapi pola perhitungannya adalah perhitungan secara individu atau perorangan

dengan realisasi pada tahun 2018 sebanyak 25.358 orang, tahun 2019 sebanyak 34.500 orang dan tahun 2020 sebanyak 240 Kelompok.

Sampai akhir triwulan I Tahun 2021 Penyuluh Satminkal BPPP Ambon masih melakukan pendampingan penyuluhan dan merencanakan proses peningkatan kelas kelompoknya sehingga pada triwulan I Tahun 2021 pencapaiannya masih 0 kelompok.

b) IKU 2 : Kelompok kelautan dan perikanan yang dibentuk di Satminkal BPPP Ambon (Kelompok)

Merupakan indikator yang menunjukkan kelompok pelaku utama Kelautan dan Perikanan yang ditumbuhkan dan dibentuk dengan kriteria pembentukan kelompok sesuai dengan Kepmen KP No. 14 Tahun 2012 tentang Pedoman Umum Penumbuhan dan Pengembangan Kelembagaan Pelaku Utama Perikanan.

IKU ini sudah ada sejak tahun 2018 pada saat penyuluh perikanan di daerah bergabung dengan pusat sehingga terbentuk Satuan Administrasi Pangkal di BPPP Ambon pada tahun 2017, namun merupakan target antara Seksi Penyuluhan dengan penyuluh Satminkal dengan target sebanyak 70 % penyuluh yang melakukan penilaian kelas kelompok. Pada tahun 2019 nilai pencapaian IKU ini sudah mencapai 1.462 unit dan tahun 2020 nilai pencapaiannya sebanyak 136 kelompok, penghitungan dilakukan dengan cara menghitung Jumlah kelompok Pelaku utama yang dibentuk yang termuat di dalam laporan

kinerja penyuluh perikanan yang dibuktikan dengan Berita Acara Penumbuhan kelompok yang termuat di dalam laporan kinerja penyuluh perikanan. sampai akhir triwulan I Tahun 2021, Penyuluh Satminkal BPPP ambon telah melakukan pendataan calon kelompok yang ditumbuhkan kelompoknya sebanyak 10 kelompok dari target sebanyak 100 kelompok.



Gambar 7. Pembentukan Kelompok Di Kota Sorong



Gambar 8. Pembentukan Kelompok Di Kab. Seram Bagian Timur



Gambar 9. Pembentukan Kelompok Di Kab. Kep. Taliabu



Gambar 10. Pembentukan Kelompok Di Kab. Raja Ampat

2. Sasaran Kegiatan 2 : Kapasitas dan Kompetensi SDM KP meningkat.

Untuk mencapai Sasaran kegiatan kapasitas dan kompetensi SDM KP meningkat terdapat 3 (tiga) Indikator kinerja yang ditetapkan yaitu IKU 3 : Desa mitra/kawasan mitra yang menerapkan Iptek KP di BPPP Ambon (desa). IKU 4 : Persentase lulusan Pendidikan dan pelatihan yang terserap di Dunia Usaha dan Dunia Industri BPPP Ambon dan IKU 5 : Lulusan pelatihan yang membentuk start up (Usaha Rintisan) BPPP Ambon.

- a) IKU 3 : Desa/kawasan mitra yang menerapkan Iptek KP di BPPP Ambon (desa)

Desa adalah kesatuan masyarakat hukum yang memiliki batas wilayah yang berwenang untuk mengatur dan mengurus urusan pemerintahan, kepentingan masyarakat setempat berdasarkan prakarsa masyarakat, hak asal usul, dan/atau hak tradisional yang diakui dan dihormati dalam sistem pemerintahan Negara Kesatuan Republik Indonesia (UU No. 6/2014).

Inovasi adalah cara-cara baru atau teknologi baru yang digunakan untuk memperbaiki kehidupan sosial ekonomi masyarakat agar berdaya guna dan berhasil guna. Teknologi merupakan materi konkret (*hard* atau *soft*) pengetahuan untuk penggunaan praktis, yang dapat mengubah pengalaman manusia dan dunia yang dihuninya. Desa mitra

adalah desa komunitas kp yang memanfaatkan teknologi dan inovasi kelautan dan perikanan untuk memperbaiki kehidupan masyarakat kp. IKU ini merupakan IKU baru yang baru ada pada tahun 2020, penghitungan dilakukan dengan cara menghitung jumlah Desa yang memanfaatkan tehnologi dan inovasi kelautan dan perikanan tahun 2020 yang dibuktikan dengan MOU/PKS antara Kepala Badan RSDMKP dengan Bupati/Walikota. sampai akhir triwulan I Tahun 2021, BPPP Ambon masih melakukan identifikasi calon Desa/kawasan mitra yang menerapkan Iptek KP sehingga nilai pencapaiannya masih 0 paket.

b) IKU 4 : Persentase lulusan Pendidikan dan pelatihan yang terserap di Dunia Usaha dan Dunia Industri BPPP Ambon

Merupakan indikator yang menggambarkan Jumlah lulusan pelatihan yang menunjukkan Jumlah lulusan pelatihan pelaku utama/usaha yang menerapkan hasil pelatihan di DUDI.

IKU ini merupakan IKU baru yang baru ada pada tahun 2020, penghitungan dilakukan dengan cara menghitung jumlah pelaku utama/pelaku usaha KP yang telah dilatih dan menerapkan hasil pelatihannya yang dihitung melalui evaluasi pasca pelatihan sekurang-kurangnya setelah 1 siklus produksi setelah dilatih. Sampai akhir triwulan I Tahun 2021, BPPP ambon masih melakukan identifikasi purnawidya yang telah menerapkan usahanya dibidang dunia usaha dan dunia industri sehingga pencapaiannya masih 0 orang.

c) IKU 5 : Lulusan pelatihan yang membentuk start up (Usaha Rintisan) BPPP Ambon.

Merupakan indikator yang menunjukkan jumlah lulusan pelatihan yang melakukan wirausaha dengan memanfaatkan teknologi digital dalam mengembangkan usahanya (pengembangan ekonomi digital) dan atau membuat jejaring pasar.

IKU ini merupakan IKU baru yang baru ada pada tahun 2020, penghitungan dilakukan dengan cara menghitung jumlah pelaku utama lulusan pelatihan yang melakukan wirausaha dan memanfaatkan teknologi digital dan atau jejaring pasar dalam pengembangan usahanya yang dihitung melalui evaluasi pasca pelatihan sekurang-kurangnya setelah 1 siklus periode setelah dilatih. Sampai akhir triwulan I Tahun 2021, BPPP ambon masih melakukan identifikasi pelaku utama lulusan pelatihan yang melakukan wirausaha dan memanfaatkan teknologi digital dan atau jejaring pasar dalam pengembangan usahanya, sehingga nilai pencapaian masih 0 orang.

3. Sasaran Kegiatan 3 : Tersedianya Sarana dan Prasarana Pelatihan dan Penyuluhan KP Yang Terstandar

Untuk mencapai Sasaran kegiatan tersedianya sarana dan prasarana pelatihan dan penyuluhan KP Yang terstandar terdapat 2 Indikator kinerja yang ditetapkan yaitu IKU 6 : Jumlah sarana pelatihan dan penyuluhan KP

Yang Terstandar di BPPP Ambon. IKU 7 : Jumlah Prasarana pelatihan dan penyuluhan KP Yang Terstandar.

- a) IKU 6 : Jumlah sarana pelatihan dan penyuluhan KP Yang Terstandar di BPPP Ambon

Merupakan indikator Peningkatan kapasitas sarana yang berbentuk pengadaan fisik dan non fisik/belanja modal yang dilaksanakan oleh satuan kerja lingkup BPPP Ambon.

IKU ini merupakan IKU baru yang baru ada pada tahun 2021, penghitungan dilakukan dengan cara menghitung Jumlah Sarana yang berbentuk pengadaan fisik dan non fisik /belanja modal. Sampai akhir triwulan I Tahun 2021, BPPP ambon masih dalam tahap pengadaan sarana sehingga nilai pencapaiannya masih 0 paket.

- b) IKU 7 : Jumlah prasarana pelatihan dan penyuluhan KP Yang Terstandar di BPPP Ambon

Merupakan indikator Peningkatan kapasitas prasarana yang berbentuk pengadaan fisik dan non fisik/belanja modal yang dilaksanakan oleh satuan kerja lingkup BPPP Ambon.

IKU ini merupakan IKU baru yang baru ada pada tahun 2021, penghitungan dilakukan dengan cara menghitung Jumlah prasarana yang berbentuk pengadaan fisik dan non fisik /belanja modal. Sampai

akhir triwulan I Tahun 2021, BPPP ambon masih dalam tahap pengadaan prasarana sehingga nilai pencapaiannya masih 0 paket.

4. Sasaran Kegiatan 4 : Terselenggaranya Penyuluhan Kelautan dan Perikanan

Untuk mencapai Sasaran kegiatan terselenggaranya penyuluhan kelautan dan perikanan terdapat 2 Indikator kinerja yang ditetapkan yaitu IKU 8 : Jumlah kelompok pelaku utama/pelaku usaha yang disuluh di BPPP Ambon dan IKU 9 : Jumlah percontohan penyuluhan kelautan dan perikanan yang diterapkan di BPPP Ambon.

- a) IKU 8 : Jumlah kelompok pelaku utama/pelaku usaha yang disuluh di BPPP Ambon.

Merupakan indikator yang menunjukkan jumlah kelompok pelaku utama/ pelaku usaha yang disuluh oleh Penyuluh Perikanan. Kegiatan Penyuluhan yang dilakukan oleh Penyuluh Perikanan diantaranya seperti: Pendampingan kelompok, penilaian kelas kelompok, pendampingan akses modal, pendampingan akses pasar, pendampingan akses informasi/teknologi, pembinaan UMKM dan Koperasi, pendampingan kelompok penerima bantuan.

IKU ini sudah ada sejak tahun 2018 pada saat penyuluh perikanan di daerah bergabung dengan pusat sehingga terbentuk Satuan Administrasi Pangkal di BPPP Ambon pada tahun 2017, akan tetapi pola

perhitungannya adalah perhitungan secara individu atau perorangan dengan realisasi pada tahun 2018 sebanyak 25.358 orang, pada tahun 2019 sebanyak 34.500 orang dan pada tahun 2020 sebanyak 2.686 kelompok, sampai akhir triwulan I tahun 2021 Penyuluh Satminkal BPPP ambon sudah melakukan penyuluhan sebanyak 851 kelompok dari target kelompok tahunan yang disuluh sebanyak 2.518 kelompok.



Gambar 11. Kegiatan Penyuluhan di Kab. Manokwari



Gambar 12. Kegiatan Penyuluhan di Kota Sorong

- b) IKU 9 : Jumlah percontohan penyuluhan kelautan dan perikanan yang diterapkan di BPPP Ambon.

Merupakan indikator yang menunjukkan salah satu metode penyuluhan dalam bentuk percontohan penyuluhan KP di lokasi percontohan yang telah ditentukan. Penghitungan dilakukan dengan cara menjumlahkan Identifikasi jumlah percontohan penyuluhan KP. IKU ini sudah ada pada tahun 2019 dengan pencapaian sebanyak 2 kelompok dan pada tahun 2020 sebanyak 1 kelompok. Sampai akhir triwulan I Tahun 2021, BPPP ambon masih melakukan tahap identifikasi calon kelompok yang akan

dijadikan percontohan penyuluhan kelautan dan perikanan sehingga pencapaiannya masih 0 unit.

5. Sasaran Kegiatan 5 : Terselenggaranya Pelatihan SDM Kelautan dan Perikanan

Untuk mencapai Sasaran kegiatan terselenggaranya pelatihan SDM kelautan dan perikanan terdapat 4 Indikator kinerja yang ditetapkan yaitu IKU 10 : Jumlah masyarakat kelautan dan perikanan yang dilatih di BPPP Ambon, IKU 11 : Pelaksanaan pelatihan masyarakat berbasis "*Full Online Training*" BPPP Ambon, IKU 12 : Tersedianya materi pelatihan berbasis Kaji Widya di BPPP Ambon dan IKU 13 : Sertifikasi kelembagaan pelatihan dan penyuluhan sesuai standar Lembaga pelatihan di BPPP Ambon.

a) IKU 10 : Jumlah masyarakat kelautan dan perikanan yang dilatih di BPPP Ambon.

Merupakan indikator yang menunjukkan jumlah masyarakat kelautan dan perikanan yang telah dilatih dibidang kelautan dan perikanan.

Realisasi IKU pada tahun 2015 sampai dengan 2018 sebanyak 6.784 orang, dengan rincian sebagai berikut : Tahun 2015 sebanyak 2.992 orang, pada tahun 2016 sebanyak 840 orang, pada tahun 2017 sebanyak 840 orang, pada tahun 2018 sebanyak 1.712 orang, pada tahun 2019 sebanyak 400 orang dan pada tahun 2020 sebanyak 1.165 orang, Sampai akhir triwulan I Tahun 2021 sudah dilakukan pelatihan masyarakat dengan metode *blended training* sebanyak 15 angkatan

dengan masing-masing Angkatan sebanyak 30 orang sehingga pencapaian secara keseluruhan sebanyak 450 orang purnawidya. Metode ini juga dibantu oleh para penyuluh dilapangan untuk mengawal dan membantu para peserta pelatihan dalam melakukan proses pelatihan baik dalam mengakses E-Jaring sebagai media pembelajaran online maupun tatap muka secara daring dengan menggunakan aplikasi zoom.



Gambar 13. Kegiatan Pelatihan Bidang Pengolahan Hasil Perikanan



Gambar 14. Kegiatan Pelatihan Bidang Penangkapan Ikan



Gambar 15. Kegiatan Pelatihan Bidang Permesinan Kapal Perikanan



Gambar 16. Kegiatan Pelatihan Bidang Budidaya Perikanan

b) IKU 11 : Pelaksanaan pelatihan masyarakat berbasis “*Full Online Training*” BPPP Ambon.

Merupakan indikator yang menunjukkan jumlah pelaksanaan pelatihan masyarakat berbasis *Full Online Training* yang dilaksanakan oleh Balai Pelatihan dan Penyuluhan pada tahun 2021

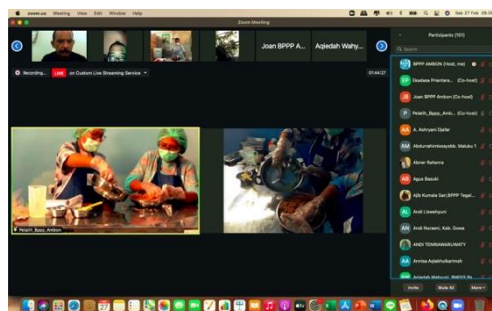
IKU ini merupakan IKU baru yang ada ditahun 2021. Cara perhitungan ini IKU ini dengan cara mengakumulasi jumlah paket pelatihan *full online training* yang telah dilakukan oleh BPPP Ambon. Sampai saat ini, BPPP Ambon telah menyelenggarakan 4 paket pelatihan *full online training* sehingga pencapaiannya sudah 4 paket.



Gambar 17. pelatihan “*full online training*” Bidang Permesinan



Gambar 18. pelatihan “*full online training*” Bidang Penangkapan Ikan



Gambar 19. pelatihan “*full online training*” Bidang Pengolahan hasil perikanan



Gambar 20. pelatihan “*full online training*” Bidang Budidaya Perikanan

c) IKU 12 : Tersedianya materi pelatihan berbasis Kaji Widya di BPPP Ambon.

Merupakan indikator yang menunjukkan jumlah Paket Kaji Widya yang dibuat oleh Instruktur/ Widyaiswara di BPPP yang dapat dimanfaatkan sebagai bahan materi pelatihan kelautan dan perikanan.

IKU ini merupakan IKU baru yang ada ditahun 2021. Cara perhitungan ini IKU ini dengan cara mengakumulasi jumlah paket kajiwidya yang dihasilkan oleh BPPP Ambon. Sampai saat ini BPPP Ambon masih merencanakan kajiwidya yang akan dilakukan oleh Widyaiswara dan instruktur dan masih menunggu petunjuk teknis pelaksanaan kajiwidya dari Puslatluh KP sehingga nilai pencapaiannya masih 0 paket.

d) IKU 13 : Sertifikasi kelembagaan pelatihan dan penyuluhan sesuai standar Lembaga pelatihan di BPPP Ambon.

Merupakan indikator yang menunjukkan jumlah SDM KP yang mengikuti uji kompetensi sesuai dengan persyaratan uji kompetensi.

IKU ini merupakan IKU yang sudah ada sejak tahun 2018, realisasi pada tahun 2018 sebanyak 1 unit, pada tahun 2019 sebanyak 1 unit dan pada tahun 2020 sebanyak 1 unit. Sampai akhir triwulan I tahun 2021 BPPP ambon masih melakukan perencanaan sertifikasi kelembagaan yang rencananya akan dilakukan survailance oleh TUV SUD sehingga pencapaiannya masih 0 lembaga.

6. Sasaran Kegiatan 6 : Tatakelola Pemerintahan Yang Baik Lingkup BPPP Ambon

Untuk mencapai Sasaran kegiatan Tatakelola pemerintahan yang baik lingkup BPPP Ambon terdapat 7 Indikator kinerja yang ditetapkan yaitu IKU 14 : Persentase layanan dukungan manajemen internal BPPP Ambon, IKU 15 : Nilai Rekonsiliasi Kinerja BPPP Ambon, IKU 16 : Persentase unit kerja yang menerapkan system manajemen pengetahuan yang terstandar BPPP Ambon, IKU 17 : Indeks profesionalitas ASN BPPP Ambon, IKU 18 : Persentase penyelesaian temuan LHP BPK BPPP Ambon, IKU 19 : Nilai kinerja pelaksanaan anggaran BPPP Ambon dan IKU 20 : Nilai kinerja anggaran BPPP Ambon.

a) IKU 14 : Persentase layanan dukungan manajemen internal BPPP Ambon.

Merupakan indikator yang menunjukkan pemenuhan layanan dukungan manajemen internal BPPP Ambon berupa tersedianya laporan-laporan kegiatan BPPP Ambon.

Perhitungan Persentase layanan dukungan manajemen internal BPPP Ambon ini dihitung berdasarkan pemenuhan laporan-laporan kegiatan BPPP Ambon berupa laporan tahunan, laporan pelaksanaan program dan kegiatan dan laporan keuangan.

Sampai akhir triwulan I tahun 2021, nilai pencapaian ini masih 0 dikarenakan penilaian layanan dukungan manajemen internal dilakukan pada akhir tahun 2021.

b) IKU 15 : Nilai Rekonsiliasi Kinerja BPPP Ambon.

Merupakan indikator yang menunjukkan keselarasan antara dokumen Laporan Kinerja (LKJ), Target Kinerja dan Cara Pencapaian Kinerja dari masing-masing indikator yang diperjanjikan dalam PK.

Penghitungan Nilai Rekonsiliasi Data Kinerja dilakukan pada 3 (tiga) aspek yaitu :

- Aspek Kepatuhan (A-I) : Aspek kepatuhan dilakukan dengan melakukan penilaian pada ketersediaan dokumen yang dibutuhkan yang meliputi : PK, Manual IKU, Rincian Target IKU, Renaksi, LKJ/LCK TW I s.d III dan data dukung LKJ/LCK TW III
- Aspek Kesesuaian (A-II) : Aspek kesesuaian dilakukan dengan melihat rata-rata nilai kesesuaian dokumen pada kriteria kesesuaian target, kesesuaian realisasi dan kesesuaian informasi data
- Aspek Ketercapaian (A-III) : Aspek ketercapaian dilakukan dengan melihat rata-rata nilai pencapaian IKU + IK pada TW I, TW II dan TW III Tahun 2020 pada aplikasi kinerjaku

Sampai akhir triwulan I tahun 2021, nilai pencapaian ini masih 0 dikarenakan penilaian rekon kinerja dilakukan oleh BRSDM KP pada akhir tahun 2021.

c) IKU 16 : Persentase unit kerja yang menerapkan system manajemen pengetahuan yang terstandar BPPP Ambon.

Sistem Manajemen Pengetahuan adalah suatu rangkaian yang memanfaatkan teknologi informasi yang digunakan oleh instansi pemerintah ataupun swasta untuk mengidentifikasi, menciptakan, menjelaskan, dan mendistribusikan pengetahuan untuk digunakan kembali, diketahui dan dipelajari. Jumlah unit kerja yang tergabung dalam media yang *menshared* data sesuai dengan data yang di distribusikan dalam aplikasi *Btrix*. IKU ini merupakan IKU yang sudah ada pada tahun 2017 dengan realisasi sebesar 70,80 % dan tahun 2018 sebesar 95,23%, tahun 2019 sebesar 100% dan tahun 2020 sebesar 100%. Sampai akhir triwulan I Tahun 2021 BPPP Ambon memperoleh nilai hasil perhitungan IKU ini oleh Puslat KP dan diperoleh nilai sebagai berikut :

= Pemenuhan Dokumen MP yang sudah diupload dalam aplikasi Btrix
+ Keikutsertaan MP dalam aplikasi Btrix +Keaktifan MP dalam aplikasi Btrix
= 20 + 40+ 40
= 100%

Perolehan nilai tersebut dikarenakan keaktifan para pejabat dalam menshare manajemen pengetahuan secara kontinyu pada aplikasi Bitrix KKP dan pemenuhan dokumen kinerja yang diupload pada aplikasi Bitrix KKP.

d) IKU 17 : Indeks profesionalitas ASN BPPP Ambon.

Indeks profesionalitas ASN dimaksud terdiri dari Kehadiran Pegawai, Capaian Kinerja (SKP), LHKASN/LHKPN, terhadap Pejabat yang telah dilakukan Asesmen. IKU ini merupakan IKU yang sudah ada pada tahun 2017 dengan realisasi sebesar 81,51 % dan tahun 2018 sebesar 93,25%, tahun 2019 sebesar 75,88% dan tahun 2020 sebesar 76,28%. Perhitungan ini juga dapat dilihat melalui website <http://ropeg.kkp.go.id:4080/?#/ip-asn/eselon> dengan perhitungan nilai sebagai berikut :

= Indeks kualifikasi pendidikan ASN + Indeks disiplin ASN + Indeks kinerja ASN + Indeks kompetensi ASN

Sampai akhir triwulan I Tahun 2021 BPPP ambon masih melakukan input data kepegawaian kedalam aplikasi epegawai masing-masing pegawai, sosialisasi tentang komponen yang harus diisi pada aplikasi e-pegawai yang akan terhubung dengan Ropeg KKP oleh setiap ASN BPPP Ambon sehingga nilai pencapaiannya masih 0.

e) IKU 18: Persentase penyelesaian temuan LHP BPK BPPP Ambon.

Merupakan indikator batas tertinggi presentase temuan Laporan Hasil Pemeriksaan atas Laporan Keuangan BPPP Ambon dibandingkan realisasi tahun 2020.

IKU ini merupakan IKU yang sudah ada pada tahun 2018, realisasi pada tahun 2018 sebesar 0 %, pada tahun 2019 juga sebesar 0% dan pada tahun 2020 sebesar 0,01%

IKU ini merupakan hasil penilaian dari level atasannya yaitu dari BRSDM KP yang dihitung akhir tahun 2021 sehingga pencapaian IKU BPPP Ambon masih 0%.

f) IKU 19 : Nilai kinerja pelaksanaan anggaran BPPP Ambon.

Nilai Kinerja Pelaksanaan Anggaran adalah proses menghasilkan suatu nilai capaian kinerja untuk setiap indikator yg dilakukan dengan membandingkan data realisasi dengan target yang telah direncanakan sebelumnya.

IKU ini merupakan IKU yang sudah ada pada tahun 2017 dengan realisasi sebesar 90,50%, tahun 2018 sebesar 86,83%, pada tahun 2019 sebesar 95,39% dan tahun 2020 sebesar 92,83%. Perolehan nilai ini berdasarkan perhitungan pada aplikasi OM SPAN BPPP Ambon dengan perolehan pada triwulan I tahun 2020 sebesar 98,11%.

g) IKU 20 : Nilai kinerja anggaran BPPP Ambon.

Nilai Kinerja anggaran adalah proses menghasilkan suatu nilai capaian kinerja untuk setiap indikator yg dilakukan dengan membandingkan data realisasi dengan target yang telah direncanakan sebelumnya.

IKU ini merupakan IKU yang sudah ada pada tahun 2017 dengan realisasi sebesar 90,50%, tahun 2018 sebesar 86,83%, pada tahun 2019 sebesar 95,39% dan pada tahun 2020 sebesar 92,03%

Perhitungan ini berdasarkan perhitungan pada aplikasi SMART DJA dan pada triwulan I tahun 2021 aplikasi SMART DJA masih dalam tahap pengembangan sehingga pencapaian nilainya masih 0%

3.3 Akuntabilitas Keuangan

Penyerapan anggaran BPPP Ambon pada Tanggal 31 Maret 2021, dapat dilihat pada tabel 3 berikut :

Tabel 3. Realisasi anggaran sampai dengan tanggal 31 Maret 2021

URAIAN	JUMLAH ANGGARAN (Rp.)	REALISASI	SISA ANGGARAN	%
PROGRAM RISET SUMBER DAYA MANUSIA KELAUTAN DAN PERIKANAN	50.366.238.000	9.479.116.484	40.638.487.789	18,82
PROGRAM PENDIDIKAN DAN PELATIHAN VAKASI	9.972.049.000	2.248.766.862	7.723.282.138	22,55
Pelatihan dan Penyuluhan Kelautan dan Perikanan	9.972.049.000	2.248.766.862	7.723.282.138	22,55
Penelitian dan Pengembangan Produk	57.333.000	-	57.333.000	0,00
Fasilitasi dan Pembinaan Kelompok Masyarakat	4.702.036.000	684.840.000	4.017.196.000	14,56
Sarana Bidang Kemaritiman, Kelautan dan Perikanan	1.095.823.000	743.540.000	352.283.000	67,85
Prasarana Bidang Kemaritiman, Kelautan dan Perikanan	1.604.177.000	582.731.862	1.021.445.138	36,33
Pelatihan Bidang Pertanian dan Perikanan	2.512.680.000	237.655.000	2.275.025.000	9,46
PROGRAM DUKUNGAN MANAJEMEN	40.394.189.000	7.230.349.622	32.915.205.651	17,90
Dukungan Manajemen Internal Lingkup BRSDM KP	40.394.189.000	7.230.349.622	32.915.205.651	17,90
Layanan Perkantoran	40.108.878.000	7.211.672.349	32.897.205.651	17,98
Layanan Perencanaan dan Penganggaran Internal	18.000.000	-	18.000.000	0,00
Layanan Umum	251.111.000	18.677.273		7,44
Layanan Monitoring dan Evaluasi Internal	16.200.000	-		0,00

Dalam perjalanannya terdapat beberapa permasalahan dalam pelaksanaan kegiatan antara lain:

1. Belum terealisasinya anggaran Tunjangan Kinerja Penyuluh Satminkal BPPP Ambon secara penuh setiap bulannya dikarenakan kurang tertibnya penyuluh dalam menyampaikan data dukung pembayaran tunjangan berupa presensi dan capaian kinerja
2. Belum terealisasinya anggaran Biaya Operasional Penyuluh (BOP) PNS dan Penyuluh Perikanan Bantu Satminkal BPPP Ambon secara penuh setiap bulannya dikarenakan kurang tertibnya penyuluh dalam menyampaikan data dukung pembayaran BOP.

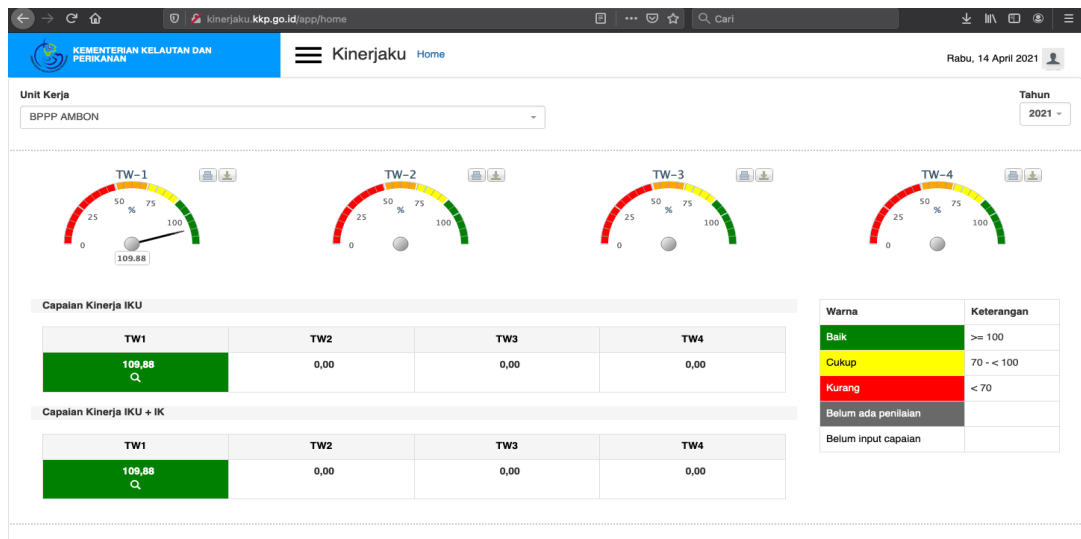
Secara umum kinerja BPPP Ambon triwulan I tahun 2021 telah dilaksanakan dan capaian kinerja yang dihasil tercapai secara optimal. Namun demikian secara teknis masih tetap perlu dilakukan optimasi pelaksanaan kegiatan seperti:

1. Sosialisasi kepada penyuluh Satminkal BPPP Ambon tentang mekanisme pembayaran Tunjangan Kinerja sehingga anggaran Tunjangan Kinerja Penyuluh dapat dibayarkan penuh setiap bulannya.
2. Sosialisasi kepada penyuluh PNS dan PPB Satminkal BPPP Ambon tentang mekanisme pembayaran BOP sehingga anggaran BOP Penyuluh PNS dan PPB dapat dibayarkan penuh setiap bulannya.

BAB IV. PENUTUP

4.1 Capaian Kinerja Utama

Pada akhir triwulan I tahun 2021, BPPP Ambon memiliki tanggung jawab untuk mewujudkan 6 Sasaran Kegiatan dan 20 Indikator Kinerja Utama. Pengukuran capaian kinerja BPPP Ambon triwulan I tahun 2021 dilakukan dengan cara membandingkan antara target (rencana) dan realisasi indikator kinerja utama (*key performance indikator*, disingkat KPI) pada masing-masing perspektif. Pencatatan dan pengukuran kinerja dilakukan dengan bantuan perangkat lunak berbasis *balanced scorecard* dari Kementerian Kelautan Perikanan, yaitu pada <http://kinerjaku.kkp.go.id>. Dari hasil pengukuran kinerja tersebut, diperoleh data capaian kinerja BPPP Ambon di tingkat korporat triwulan I tahun 2021 sebesar 109,88%, sebagaimana dashboard kinerjaku sebagai berikut:



Gambar 28. Dashboard Kinerjaku Level 3 BPPP Ambon

Selama triwulan I tahun 2020, dari 20 IKU BPPP Ambon ada 6 IKU yang telah ada nilai Realisasinya dan telah sesuai dengan rencana aksi pada triwulan I tahun 2021. Rincian target dan realiasi dari 6 IKU tersebut adalah:

- 1) IKU 2 : Kelompok kelautan dan perikanan yang dibentuk di Satminkal BPPP Ambon, sampai akhir triwulan I Tahun 2021 Penyuluh Satminkal BPPP ambon sudah melakukan pembentukan kelompok kelautan dan perikanan sebanyak 10 kelompok dari target kelompok yang dibentuk sebanyak 10 kelompok pada triwulan I tahun 2021.
- 2) IKU 8 : Jumlah Kelompok Pelaku utama/ Pelaku Usaha yang disuluh di BPPP Ambon, sampai akhir triwulan I Tahun 2021 Penyuluh Satminkal BPPP ambon sudah melakukan penyuluhan kepada kelompok pelaku utama/pelaku usaha sebanyak 851 kelompok dari target kelompok yang disuluh sebanyak 600 kelompok pada triwulan I tahun 2021.
- 3) IKU 10 : Jumlah masyarakat kelautan dan perikanan yang dilatih BPPP Ambon, sampai akhir triwulan I Tahun 2021 BPPP ambon sudah melakukan pelatihan kepada masyarakat kelautan dan perikanan sebanyak 450 orang dari target masyarakat yang dilatih sebanyak 450 orang pada triwulan I tahun 2021.
- 4) IKU 11 : Pelaksanaan Pelatihan Masyarakat Berbasis "*Full Online Training*" BPPP Ambon, sampai akhir triwulan I Tahun 2021 BPPP ambon sudah melakukan pelatihan kepada masyarakat berbasis "*Full Online Training*" sebanyak 4 paket dari target sebanyak 4 paket pada triwulan I tahun 2021.

- 5) IKU 16 : Presentase unit kerja yang menerapkan sistem manajemen pengetahuan yang terstandar lingkup BPPP Ambon, sampai akhir triwulan I Tahun 2021 BPPP Ambon memperoleh nilai hasil perhitungan IKU ini oleh Puslat KP dan diperoleh nilai 100% dari target sebesar 86% pada triwulan I tahun 2021.
- 6) IKU 13 : Nilai Kinerja Pelaksanaan Anggaran Balai Pelatihan dan Penyuluhan Perikanan Ambon, sampai akhir triwulan I Tahun 2021 BPPP Ambon memperoleh nilai hasil perhitungan IKU ini pada aplikasi OM SPAM diperoleh nilai 98,11 dari target sebesar 80% pada triwulan I tahun 2021.

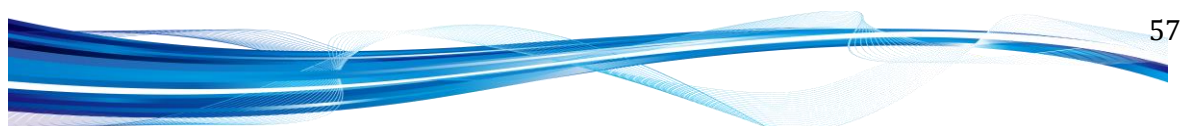
4.2 Permasalahan dan Rekomendasi

1. Capaian IKU SDM KP yang dilatih dikhawatirkan tidak akan mencapai target terkendala pelaksanaan pelatihan keahlian bidang kelautan dan perikanan berbasis PNBP, sampai saat ini unit BST BPPP Ambon masih dalam tahap *approval* sehingga pelaksanaan pelatihan keahlian bidang kelautan dan perikanan berbasis PNBP belum dapat dilaksanakan, mengingat target peserta pelatihan ini sebanyak 393 orang.

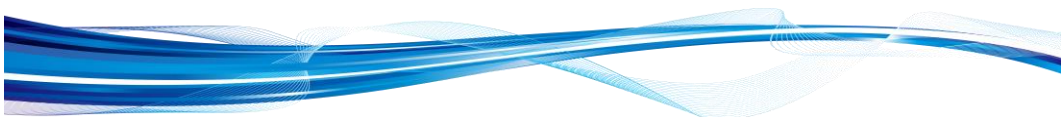
2. IKU dengan Target Kinerja Tahunan

Indikator Kinerja Utama yang memiliki target tahunan tetap harus dimonitor perkembangan pelaksanaan kegiatan. Penanggung jawab IKU agar memastikan bahwa capaian akhir tahun dapat dicapai dengan baik sesuai target yang telah ditetapkan.

Laporan Kinerja ini diharapkan dapat memberikan informasi secara transparan dan akuntabel bagi seluruh stakeholders BPPP Ambon. Laporan ini juga menjadi bahan evaluasi untuk peningkatan pengelolaan kinerja BPPP Ambon. Akhirnya, BPPP Ambon berharap dapat terus meningkatkan kontribusi untuk mewujudkan Kesejahteraan Masyarakat KP.



LAMPIRAN





**KEMENTERIAN KELAUTAN DAN PERIKANAN
BADAN RISET DAN SUMBER DAYA MANUSIA
KELAUTAN DAN PERIKANAN**

JALAN MEDAN MERDEKA TIMUR NOMOR 16
JAKARTA 10110, KOTAK POS 4130 JKP 10041
TELEPON (021) 3519070 (LACAK), FAKSIMILE (021) 3513287
LAMAN www.kkp.go.id

**PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2021
BALAI PELATIHAN DAN PENYULUHAN PERIKANAN AMBON**

Dalam rangka mewujudkan manajemen pemerintahan yang efektif, transparan, akuntabel dan berorientasi pada hasil, kami yang bertanda tangan di bawah ini :

Nama : **Abubakar**
Jabatan : Kepala Balai Pelatihan dan Penyuluhan Perikanan Ambon

Selanjutnya disebut **pihak pertama**

Nama : **Lilly Aprilya Pregiwati**
Jabatan : Kepala Pusat Pelatihan dan Penyuluhan Kelautan dan Perikanan

Selaku atasan pihak pertama, selanjutnya disebut **pihak kedua**

Pihak pertama berjanji akan mewujudkan target kinerja yang seharusnya sesuai lampiran perjanjian ini, dalam rangka mencapai target kinerja jangka menengah seperti yang telah ditetapkan dalam dokumen perencanaan. Keberhasilan dan kegagalan pencapaian target kinerja tersebut menjadi tanggung jawab kami.

Pihak kedua akan melakukan supervisi yang diperlukan serta akan melakukan evaluasi terhadap capaian kinerja dari perjanjian ini dan mengambil tindakan yang diperlukan dalam rangka pemberian penghargaan dan sanksi.

Jakarta, 19 Januari 2021

Pihak Kedua

Kepala Pusat Pelatihan dan
Penyuluhan Kelautan dan Perikanan

Lilly Aprilya Pregiwati

Pihak Pertama

Kepala Balai Pelatihan dan
Penyuluhan Perikanan Ambon

Abubakar

PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2021
BALAI PELATIHAN DAN PENYULUHAN PERIKANAN AMBON

NO	SASARAN KEGIATAN	NO	INDIKATOR KINERJA	TARGET
1	Pendampingan kelompok pelaku usaha/utama dalam mendukung terwujudnya kesejahteraan masyarakat KP	1	Kelompok kelautan dan perikanan yang ditingkatkan kelasnya di Satminkal BPPP Ambon (Kelompok)	35
		2	Kelompok kelautan dan perikanan yang dibentuk di Satminkal BPPP Ambon (Kelompok)	100
2	Kapasitas dan kompetensi SDM KP meningkat	3	Desa/kawasan mitra yang menerapkan Iptek di BPPP Ambon (paket)	1
		4	Persentase lulusan pendidikan dan pelatihan yang terserap di Dunia Usaha dan Dunia Industri BPPP Ambon (%)	60
		5	Lulusan pelatihan yang membentuk start up (usaha rintisan) BPPP Ambon (orang)	10
3	Tersedianya Sarana dan Prasarana Pelatihan dan Penyuluhan KP Yang Terstandar	6	Jumlah Sarana pelatihan dan penyuluhan KP yang terstandar di BPPP Ambon (unit)	1
		7	Jumlah Prasarana pelatihan dan penyuluhan KP yang terstandar di BPPP Ambon (unit)	1
4	Terselenggaranya Penyuluhan Kelautan dan Perikanan	8	Jumlah Kelompok Pelaku utama/ Pelaku Usaha yang disuluh di BPPP Ambon (kelompok)	2.518
		9	Jumlah Percontohan Penyuluhan Kelautan dan Perikanan yang diterapkan di BPPP Ambon (unit)	1
5	Terselenggaranya Pelatihan SDM Kelautan dan Perikanan	10	Jumlah masyarakat kelautan dan perikanan yang dilatih BPPP Ambon (orang)	2.893
		11	Pelaksanaan Pelatihan Masyarakat Berbasis "Full Online Training" BPPP Ambon (paket)	20
		12	Tersedianya Materi Pelatihan berbasis Kaji Widya di BPPP Ambon (Paket)	4
		13	Sertifikasi Kelembagaan Pelatihan dan Penyuluhan sesuai standar lembaga pelatihan di BPPP Ambon (lembaga)	1
6	Tatakelola pemerintahan yang baik lingkup BPPP Ambon	14	Persentase layanan dukungan manajemen internal BPPP Ambon (%)	100
		15	Nilai Rekonsiliasi Kinerja BPPP Ambon (Nilai)	80
		16	Persentase unit kerja yang menerapkan sistem manajemen pengetahuan yang terstandar BPPP Ambon (%)	84

NO	SASARAN KEGIATAN	NO	INDIKATOR KINERJA	TARGET
		17	Indeks Profesionalitas ASN BPPP Ambon (indeks)	73
		18	Persentase penyelesaian temuan LHP BPK BPPP Ambon (%)	100
		19	Nilai Kinerja Pelaksanaan Anggaran BPPP Ambon (nilai)	89
		20	Nilai Kinerja Anggaran BPPP Ambon (nilai)	86

Kegiatan : **Pelatihan dan Penyuluhan KP**
Jumlah Anggaran Tahun 2021 : **Rp 50.366.238.000,-**

Jakarta, 19 Januari 2021

Pihak Kedua

Kepala Pusat Pelatihan dan
Penyuluhan Kelautan dan Perikanan

Lilly Aprilya Pregiwati

Pihak Pertama

Kepala Balai Pelatihan dan
Penyuluhan Perikanan Ambon

Abubakar



KEMENTERIAN KELAUTAN DAN PERIKANAN
BADAN RISET DAN SUMBER DAYA MANUSIA KELAUTAN DAN PERIKANAN
BALAI PELATIHAN DAN PENYULUHAN PERIKANAN AMBON
JALAN MARTHA ALFONS, POKA KODE POS 97233 TELUK AMBON
TELEPON (0911) 322710, FAKSIMILE (0911) 322711
Website : bp3ambon-kkp.org
Email : BPPP_ambon@kkp.go.id

KEPUTUSAN
KEPALA BALAI SELAKU KUASA PENGGUNA ANGGARAN BPPP AMBON
NOMOR : KEP.19/BPPP/KP.110/I/2021

TENTANG

TIM PENYUSUNAN LAPORAN KINERJA (LKj) TAHUN 2020
DAN TRIWULAN TAHUN 2021 BPPP AMBON

- Menimbang** : 1. Bahwa untuk kelancaran dan ketertiban administrasi pelaksanaan anggaran Balai Pelatihan dan Penyuluhan Perikanan Ambon Tahun 2021 dipandang perlu menunjuk Tim Penyusunan Laporan Kinerja Tahun 2020 dan Triwulan Tahun 2021.
2. Bahwa Pegawai yang nama-namanya tersebut dalam lampiran Keputusan ini dianggap mampu memenuhi syarat untuk diangkat sebagai Tim Penyusunan Laporan Kinerja (LKj) pada BPPP Ambon.
- Mengingat** : 1. Peraturan Menteri Kelautan dan Perikanan Republik Indonesia Nomor : 27/PERMEN-KP/2017 tanggal 27Maret 2017 tentang Organisasi dan Tata Kerja Balai Pelatihan dan Penyuluhan Perikanan.
2. Keputusan Menteri Kelautan dan Perikanan Republik Indonesia Nomor : 06MEN-SJ/KP.430/IX/2020 tanggal 21 September 2020 tentang Pemberhentian dari dan Pengangkatan Dari dan Dalam Jabatan Administrasi lingkup Kementerian Kelautan dan Perikanan.
3. Keputusan Menteri Kelautan dan Perikanan Republik Indonesia Nomor : KEP.41/MEN/KU.611/2020 Tanggal 30 September 2020 Tentang Perubahan Keduabelas atas Keputusan Menteri Kelautan dan Perikanan Nomor : KEP.79/MEN/KU.611/2019 tentang Penunjukan Kuasa Pengguna Anggaran pada Satuan Kerja Kantor Daerah (Unit Pelaksana Teknis) di Lingkungan Kementerian Kelautan dan Perikanan Tahun Anggaran 2021.
- Memperhatikan** : Surat Pengesahan DIPA Nomor : SP DIPA-032.12.2.238755/2021 tanggal 23 November 2020.

MEMUTUSKAN

- Menetapkan** :
- Pertama** : Mengangkat mereka yang nama-nama dan jabatannya tersebut dalam kolom 2 dan 3 pada lampiran Keputusan ini sebagai Tim Penyusunan Laporan Kinerja (LKj) pada BPPP Ambon.

Kedua

- Kedua** : Biaya untuk keperluan Laporan Kinerja (LKj) dibebankan pada DIPA Nomor : SP DIPA-032.12.2.238755/2021 tanggal 23 November 2020 BPPP Ambon T.A. 2021.
- Ketiga** : Kepada mereka yang nama-nama dan jabatannya tersebut pada amar pertama, dalam melaksanakan tugasnya masing-masing bertanggung jawab kepada Kepala BPPP Ambon.
- Keempat** : Keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan dengan ketentuan apabila dikemudian hari ternyata terdapat kekeliruan dalam penetapan ini akan diatur dan diubah sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di : Ambon
Pada Tanggal : 04 Januari 2021

Kepala Balai Selaku
Kuasa Pengguna Anggaran,



Abubakar, S.St.Pi, M.Si
NIP. 19780427 200312 1 001

Tembusan :

1. Ketua Badan Pemeriksa Keuangan di Jakarta.
2. Menteri Keuangan Republik Indonesia
UP. – DIRJEN Anggaran di Jakarta.
3. Inspektur Jenderal Kementerian Kelautan dan Perikanan di Jakarta.
4. Sekretaris Badan Riset SDM-KP di Jakarta.
5. Kapus Pelatihan dan Penyuluhan Kelautan dan Perikanan di Jakarta
6. Kepala Biro Kepegawaian Kementerian Kelautan dan Perikanan di Jakarta.
7. Kepala Kantor Wilayah XXIX Dirjen Anggaran Ambon di Ambon.
8. KPPN Ambon di Ambon.

Lampiran : Keputusan Kepala Balai Selaku Kuasa Pengguna
Anggaran BPPP Ambon
Nomor : KEP.19/BPPP/KP.110/I/2021
Tanggal : 04 Januari 2021

**Tim Penyusunan Laporan Kinerja (LKj)
BPPP Ambon T.A. 2021**

No.	Nama	Jabatan	Uraian Tugas / Keterangan
1.	Rahmawati Umasugi, S.Pi, M.Si	Penanggungjawab Pengumpulan Data / Ketua	merencanakan, menyusun, memeriksa LKj dan mengkoordinir pengumpulan data dukung dari Seksi Program Dan Monev
2.	Pirhel, S.Sos, M.Si	Penanggungjawab Pengumpulan Data	Mengkoordinir pengumpulan data dukung dari subbagian Tata Usaha
3.	Ekadasa Priantara, ST, M.Si	Penanggungjawab Pengumpulan Data	Mengkoordinir pengumpulan data dukung dari Seksi Pelatihan
4.	A.R. Sopaheluwakan, S.Pi, M.Si	Penanggungjawab Pengumpulan Data	Mengkoordinir pengumpulan data dukung dari Seksi Penyuluhan
6.	Moh. Arief Hidayat, A.Md	Sekretaris	menyusun laporan kinerja (LKj)
7.	Fiona A.B. Nikyuluw, S.Pi, M.Si	Anggota	membantu menyusun laporan kinerja (LKj)
8.	Dessy Rompis	Anggota	membantu menyusun laporan kinerja (LKj)
9.	Wahyu Retno Aris, S.St.Pi	Anggota	membantu menyusun laporan kinerja (LKj)

Kepala Balai Selaku
Kuasa Pengguna Anggaran



Abubakar, S.St.Pi, M.Si
NIP. 19780427 200312 1 001